

Perbankan Berkelanjutan:

Apa yang Perlu Dilakukan
dan yang Sebaiknya Dihindari

Sebuah Manual dari

BankTrack

Perbankan Berkelanjutan:

Apa yang Perlu Dilakukan
dan yang Sebaiknya Dihindari

Sebuah Manual dari

BankTrack

Perbankan Berkelanjutan:
Apa yang Perlu Dilakukan dan yang Sebaiknya Dihindari
Sebuah Manual dari BankTrack

BankTrack

(edisi Bahasa Inggris, 2006)

Penulis:

Jan Willem van Gelder - Profundo

Penyunting:

Johan Frijns

Desain:

Bart Bruil, Easymind

Terima kasih untuk masukan dari:

Kavaljit Singh, Andreas Missbach, Michelle
Chan-Fishel, Victorio Mattarozzi, Christophe Scheire,
Jennifer Morgan, Mika Paluello, Andrea Baranes, Bill Barclay,
Dana Clark, Matthew Lee, Nick Hildyard

TuK Indonesia

(edisi Bahasa Indonesia, 2017)

Penerjemah:

Fahmia Badibl

Penyunting:

Jalal

Prolog:

Jan Willem van Gelder

Epilog:

Rahmawati Retno Winarni dan Jalal

Desain dan Cetak:

CV. Tumbuh Dihati

Daftar Isi

Prolog	4
1. Memulai Perbankan Berkelanjutan	6
2. Komitmen untuk Keberlanjutan	8
3. Komitmen untuk Tidak Merusak	16
4. Komitmen terhadap Tanggung Jawab	23
5. Komitmen terhadap Akuntabilitas	27
6. Komitmen atas Transparansi	31
7. Komitmen atas Pasar dan Tata Kelola Berkelanjutan	34
Kesimpulan	38
Epilog	39
Lampiran I Deklarasi Collevocchio	43
Lampiran II Sumber-sumber informasi yang direkomendasikan	47

Prolog

Masyarakat global menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan kebutuhan populasi yang tumbuh tanpa melebihi batas alami ekosistem. Sementara *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjanjikan setiap makanan, pakaian, pendidikan, perawatan kesehatan, dan cara lain untuk hidup yang layak; pada kenyataannya cukup banyak sumberdaya alam kita yang hampir habis. Iklim berubah dengan cepat, hutan lenyap dan polusi menyebar luas—perkembangan yang pada gilirannya mengancam kesehatan dan mata pencaharian sebagian besar masyarakat global.

Untuk negara seperti Indonesia, di mana lebih dari 28 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan, tantangan ini sangat nyata dan mendesak. Meski memiliki sumberdaya alam yang melimpah, kesenjangan antara kaya dan miskin masih lebar. Dari 161 juta hektar hutan di Indonesia, 21 juta hektar hilang dalam 15 tahun terakhir karena perluasan pertanian perkebunan—sementara pada saat bersamaan Indonesia mengimpor sekitar tiga juta ton beras setiap tahunnya. Pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang menyesuaikan kebutuhan seluruh penduduk dengan daya dukung sumberdaya alamnya, sangat dibutuhkan.

Karena peran sentral mereka dalam redistribusi dana investasi dan membiayai perusahaan, bank dapat berperan dalam transisi mendesak menuju jalur pembangunan ekonomi yang lebih

berkelanjutan. Pengaruh potensial mereka berasal dari kapasitas mereka untuk memilih perusahaan dan proyek mana yang akan didukung secara finansial, dan untuk menetapkan prasyarat Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (*Environment, Social and Governance* atau ESG) untuk pinjaman, investasi dan jasa keuangan lainnya.

Selama 15 tahun terakhir, semakin banyak bank di seluruh dunia yang telah mengintegrasikan prasyarat ESG ke dalam keputusan pembiayaan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan berkelanjutan telah menjadi arus utama, didorong oleh inisiatif sektor keuangan seperti *Equator Principles* (EP) dan dengan kesepakatan dan standar yang lebih umum seperti Kesepakatan Paris dan Prinsip-prinsip Panduan mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Bank-bank di Indonesia masih berada di ambang perkembangan ini. Mereka menghadapi tantangan untuk menyejajarkan diri dengan rekan-rekan internasional mereka, dengan menerapkan manajemen risiko, penapisan dan praktik keuangan mutakhir. Sebagai pemain sentral dalam perekonomian Indonesia, mereka memiliki kewajiban moral untuk memainkan peran dalam menunjukkan dan memberi stimulan bagi transformasi berkelanjutan yang merupakan kebutuhan krusial di Indonesia saat ini. Buklet ini bertujuan untuk membimbing mereka dalam perjalanan, dengan menghadirkan

pelajaran yang dipetik dari dan menyajikan praktik-praktik yang telah diterima di bidang perbankan berkelanjutan di seluruh dunia.

Saya sangat berharap agar bank-bank di Indonesia mendapatkan keuntungan dari pelajaran yang dipetik oleh rekan-rekan internasional mereka, dan menjadi pemimpin dalam transisi yang sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia menuju keberlanjutan, keadilan sosial dan pemberantasan kemiskinan.

Amsterdam, 30 Agustus 2017

Jan Willem van Gelder
direktur Profundo B.V.

1. Memulai Perbankan Berkelanjutan

Di dunia kita saat ini yang makin mengglobal, bank-bank swasta memainkan peran penting dengan mengalokasikan sumberdaya keuangannya. Karena sebagian besar pemerintah dan perusahaan di dunia bergantung pada jasa-jasa keuangan bank-bank swasta, lembaga-lembaga keuangan ini memiliki peran kunci di setiap bagian aktivitas manusia. Walaupun jasa keuangan mereka kerap digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang membahayakan lingkungan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, bank-bank juga sesungguhnya dapat menjadi agen perubahan yang luar biasa.

Perubahan yang telah dilakukan banyak bank dan terlihat dalam beberapa tahun belakangan ini untuk menjawab dampak-dampak sosial dan lingkungan dari lembaga-lembaga keuangan mereka adalah langkah pertama dan mulai berjalan menuju arah ini. Makin banyak bank menyadari bahwa mengabaikan isu-isu sosial dan lingkungan dapat meningkatkan risiko kredit, kepatuhan, dan reputasi. Namun demikian, kemajuan yang dibuat oleh bank di dalam bidang ini akan diukur bukan sekadar dari niat baik atau bahkan dari kebijakan yang kuat di atas kertas saja. Untuk meningkatkan keberlanjutan, bank-bank harus meningkatkan kinerja dan hasil di lapangan di antara masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak.

Keberlanjutan adalah mengenai pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa

mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini berarti memelihara lingkungan termasuk keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang, dan berhati-hati dengan sumberdaya alam dan iklim kita. Namun, keberlanjutan adalah juga tentang penegakan hak asasi manusia dan kehidupan yang bermartabat, serta bebas dari kemiskinan untuk semua orang yang hidup pada saat ini.

Perbankan yang berkelanjutan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Konsep perbankan yang berkelanjutan akan berevolusi seiring waktu, merespon pengalaman yang telah didapat dan untuk kemajuan pembangunan dunia. BankTrack akan terus menerus mendiskusikan subjek ini, dengan bank-bank yang berkomitmen dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pada saat ini, BankTrack menantang bank-bank untuk masuk ke dalam perjalanan menuju keberlanjutan, walaupun tidak begitu jelas, apa yang ada di balik cakrawala. Semua bank yang bermaksud untuk menapaki jalan ini memerlukan kombinasi kepemimpinan yang berani, perencanaan jangka panjang, kerangka kebijakan yang ambisius, pengembangan produk inovatif, implementasi yang efektif di seluruh organisasi bank, dan prosedur-prosedur transparansi dan akuntabilitas yang jelas.

Namun mungkin lebih penting lagi adalah kesiapan untuk mempertanyakan asumsi-

asumsi di mana strategi kesuksesan bisnis Anda saat ini berdiri di atasnya. Bank Anda harus menerima fakta bahwa ada *business case* untuk keberlanjutan, namun tidak selalu demikian, dan tidak di semua tempat. Selain urusan bisnis, ada juga urusan moral. Dalam jangka pendek, keberlanjutan yang sesungguhnya terkadang meminta kita membuat pilihan yang sulit, melewatkan peluang-peluang bisnis yang menarik, untuk menjaga sesuatu yang bahkan lebih berharga. Penghargaan untuk lembaga Anda mungkin baru akan datang kemudian, atau tidak sama sekali – setidaknya tidak dalam bentuk moneter.

Manual BankTrack ini akan membantu Anda memulai perjalanan sulit menuju perbankan berkelanjutan. Perjalanan ini menggunakan Deklarasi Collevocchio sebagai titik awal, dinamakan dari nama sebuah desa di Italia di mana deklarasi itu dibuat. Deklarasi ini diluncurkan pada bulan Januari 2003, didukung oleh 200 organisasi masyarakat sipil. Deklarasi ini menjelaskan peran dan tanggung jawab unik sektor keuangan dalam meningkatkan keberlanjutan.

Pada saat peluncurannya, Deklarasi Collevocchio dilengkapi dengan Pedoman Implementasi singkat. Semenjak saat itu, bank-bank mendapatkan pengalaman lebih jauh, pemikiran telah berkembang dan dunia sudah maju lebih jauh. Maka dari itu, manual ini dapat dianggap sebagai versi Pedoman Implementasi Deklarasi Collevocchio yang sudah diperbaharui. Ini bukanlah pedoman

definitif, bukan juga jawaban tuntas dari semua pertanyaan Anda. Kami akan terus mempublikasi versi-versi baru di masa depan, merefleksikan masukan-masukan dan merespon perkembangan-perkembangan baru.

Mengikuti enam komitmen yang ada di dalam Deklarasi Collevocchio, manual ini menuliskan apa yang harus dilakukan oleh bank-bank untuk membuat operasi mereka lebih berkelanjutan. Setiap bagian menyediakan langkah-langkah praktis untuk maju ke depan, memperhatikan baik aspek isi dan implementasi. Langkah-langkah ini berlaku untuk semua aktivitas yang dilakukan oleh bank, baik perbankan retail, perbankan komersial, perbankan investasi atau manajemen aset.

Selain apa yang perlu dilakukan, ada juga pedoman mengenai apa yang sebaiknya dihindari, di dalam bentuk kotak "Anjuran dan Larangan untuk Perbankan Berkelanjutan."

Kami rasa, langkah-langkah berikut yang dijelaskan di dalam manual ini akan sangat membantu Anda untuk memenuhi harapan masyarakat sipil. Kami mendukung semua bank yang berkomitmen di seluruh dunia untuk menggunakan manual ini dalam proses memikirkan kembali dan dalam merancang ulang identitas dan aktivitas perusahaan mereka.

2. Komitmen untuk Keberlanjutan

Lembaga keuangan harus memperluas misi-misinya, dari yang memprioritaskan laba sebesar-besarnya menjadi visi keberlanjutan sosial dan lingkungan. Komitmen untuk keberlanjutan membuat lembaga-lembaga keuangan harus mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan batasan-batasan ekologi, keadilan sosial, dan keadilan ekonomi ke dalam strategi-strategi perusahaan dan area-area bisnis utama (termasuk kredit, penanaman modal, penjaminan, dan advisori), untuk membuat tujuan-tujuan keberlanjutan menjadi setara dengan maksimalisasi nilai yang diterima oleh para pemegang saham dan kepuasan klien, dan untuk secara aktif mengusahakan transaksi-transaksi keuangan yang mengedepankan keberlanjutan.

Deklarasi Collevocchio

Definisikan kembali misi Anda

Tanda yang penting dalam jalan menuju keberlanjutan, walaupun tidak selalu di awal, adalah pendefinisian kembali misi bank dalam jangka panjang. Hal ini memerlukan pemikiran kembali mengapa bank Anda didirikan, apa yang dapat Anda tawarkan kepada dunia. Misi bank yang benar-benar mengutamakan keberlanjutan tidak dapat didefinisikan secara keseluruhan dari sudut pandang nilai pemegang saham dan kepuasan klien saja. Misi ini perlu memasukkan tujuan-tujuan keberlanjutan yang lebih luas.

Untuk memulainya, tinjaulah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Agenda 21, *Millennium Development Goals* (MDGs), dan tanyakan kepada diri Anda: bagaimana membuat keterampilan

keuangan dan pengetahuan praktis (*know-how*) dari bank kita berkontribusi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut? Bagaimana dana-dana kita dapat digunakan dengan cara yang paling efektif untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi? Bagaimana kita dapat mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan batasan-batasan ekologi dan keadilan ekonomi di seluruh aktivitas kita? Dunia seperti apa yang ingin kita ciptakan dan bagaimana kita sebagai bank membantu membentuk masa depan kita bersama? Singkatnya: apa misi kita?

Evaluasi portofolio Anda

Dengan menggunakan sudut pandang dari misi yang telah didefinisikan kembali, bank Anda perlu mengevaluasi portofolionya. Nilailah semua dampak lingkungan dan sosial dari berbagai jasa keuangan yang disediakan oleh bank kepada klien-kliennya, termasuk perbankan retail (akun tabungan, kredit, hipotek), perbankan komersial (pinjaman perusahaan, keuangan perdagangan), perbankan investasi (pengeluaran dan perdagangan saham, pembiayaan proyek, analisis saham, merger dan akuisisi, serta jasa advisori keuangan untuk perusahaan), manajemen aset, perbankan pribadi, dan bentuk-bentuk jasa keuangan lainnya.

Lihatlah kawasan dan negara di mana Anda beroperasi dan juga sektor-sektor di mana klien Anda aktif. Nilailah kontribusi-kontribusi positif dan negatif dari aktivitas-aktivitas ini terhadap misi baru Anda: apakah hal-hal tersebut mendorong keberlanjutan sosial dan lingkungan?

Kerusakan sosial dan lingkungan apakah yang diperantarai oleh uang Anda, nasihat yang Anda berikan, dan cara-cara Anda mengelola keuangan? Jasa-jasa keuangan apa sajakah yang tidak sesuai dengan misi keberlanjutan bank Anda?

Definisikan kembali strategi Anda

Evaluasi atas portofolio bank Anda akan menghasilkan pilihan-pilihan strategis. Untuk menjadi bank yang berkelanjutan, pendefinisian kembali strategi bank tidak dapat dihindarkan. Berdasarkan penilaian, dari pengalaman masa lalu, kemampuan saat ini, dan ambisi-ambisi masa depan, bank Anda perlu untuk memilih isu-isu sosial dan lingkungan yang perlu dijadikan prioritas tertinggi. Berdasarkan keputusan-keputusan strategis, bank harus memiliki jenis-jenis klien yang ingin dijadikan fokus dan sektor-sektor dan di kawasan-kawasan dan negara-negara di mana mereka ingin aktif. Pilihan-pilihan strategis ini tentunya harus diadopsi oleh para pemimpin tertinggi di bank Anda.

Jangan memperlakukan keberlanjutan hanya sebagai ceruk pasar tertentu. **Pahamilah** bahwa keberlanjutan perlu menjadi inti dari semua aktivitas usaha Anda, karena sebagian besar aktivitas yang dibiayai oleh Bank Anda memiliki dampak-dampak sosial dan lingkungan, baik dampak positif maupun negatif. Tantangannya adalah untuk menyadari dampak-dampak ini dan mengubah keseimbangannya menuju arah yang positif.

Tidak ada bank yang diharapkan untuk melakukan semua hal – maka berkonsentrasilah kepada isu-isu, sektor-sektor, dan negara-negara di mana Anda dapat membuat perubahan dalam mendorong keberlanjutan. Bekerja dengan klien global bukanlah sebuah keharusan, pun membuat jaringan Anda menjadi global. Alternatif yang lebih masuk akal adalah untuk memilih di negara mana Anda akan aktif, menawarkan berbagai jasa perbankan di sana – termasuk beragam jasa perbankan bagi masyarakat miskin.

Menyebarkan investasi dan aktivitas Anda ke banyak sektor namun secara tidak mendalam dapat melemahkan produktivitas Anda. Mungkin lebih baik memusatkan konsentrasi upaya-upaya Anda ke dalam sektor-sektor yang paling membutuhkan keterampilan Anda untuk menjaga keberlanjutan. Memahami dan bekerja secara intensif dengan beberapa sektor mungkin merupakan bentuk manajemen risiko yang lebih berkelanjutan daripada menyebarkan investasi Anda ke banyak sektor yang tidak Anda pahami dengan cukup Sistem Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial.

Saat Anda sudah melakukan langkah-langkah ini, ambillah keputusan yang sulit: keluarlah dari aktivitas-aktivitas yang jelas-jelas tidak sesuai dengan misi keberlanjutan yang Anda sebutkan, putuslah hubungan dengan klien-klien yang tidak akan mengikuti langkah Anda, akhirlah keterlibatan Anda dengan

projek-projek yang pada dasarnya mengancam apa yang dianggap baik dan berharga di dunia ini. Sungguh, tidaklah sulit untuk mengidentifikasi hal-hal ini, bisa saja semudah mengikuti perasaan Anda mengenai apa yang baik. Lalu fokuslah terhadap semua hal baik yang sedang terjadi.

Buatlah kebijakan-kebijakan sektor dan kawasan/negara

Untuk sektor-sektor dan negara-negara tertentu yang telah bank Anda pilih untuk aktif di dalamnya, Anda perlu membuat kebijakan-kebijakan konkret yang memungkinkan Anda menghadapi tantangan-tantangan yang muncul. Kebijakan-kebijakan ini memiliki dua tujuan: mendefinisikan ambisi-ambisi dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh bank dan membantu menjalankan visi keberlanjutannya secara konkret. Namun, kebijakan-kebijakan ini juga mendefinisikan standar-standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap klien sebelum bank memberikan beragam bentuk jasa keuangan kepada mereka.

Dengan menetapkan standar-standar minimum ini, kebijakan-kebijakan sektor dan negara memainkan peran yang penting di dalam Sistem Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial yang dimiliki oleh bank. Berdasarkan perjanjian-perjanjian dan standar-standar tersebut, kebijakan-kebijakan bank mengenai sektor harus mendefinisikan bagaimana bank akan bekerja dengan klien-klien

mereka sepanjang rantai nilai, dan juga dengan masyarakat sipil, untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti hak-hak masyarakat adat, hak-hak atas tanah, hak-hak pekerja, pembalakan hutan, dan ancaman-ancaman lain terhadap ekosistem yang berharga, dan lain-lain. Kebijakan-kebijakan juga harus mengindikasikan pilihan-pilihan bank untuk jenis perusahaan dan inisiatif tertentu, seperti koperasi-koperasi berbasis masyarakat. Pada saat yang sama, kebijakan-kebijakan juga perlu untuk mendefinisikan sebuah garis dasar dengan syarat-syarat yang jelas dan terukur: standar-standar minimum yang dapat diterima oleh bank yang harus dipenuhi oleh setiap dan seluruh klien di dalam sektor. Jika standar-standar minimum ini tidak dipenuhi, bank tidak akan menyediakan bentuk jasa keuangan apapun.

Standar-standar minimum tersebut sering kali tidak mengikuti standar-standar internasional secara otomatis, namun perlu didefinisikan dan diinterpretasikan oleh bank. Kebijakan sektor dan isu dapat berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional yang relevan untuk sektor-sektor tertentu, seperti *UN Framework Convention on Climate Change* dan *Kyoto Protocol* yang memberikan pedoman-pedoman penting untuk sektor-sektor

yang mengeluarkan gas rumah kaca yang besar. Konvensi-konvensi lain yang penting dalam hal ini adalah *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants*, *Ramsar Convention on Wetlands* dan *ILO Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*. Kebijakan-kebijakan sektor juga dapat berdasarkan inisiatif-inisiatif berbagai pemangku kepentingan yang mendefinisikan praktik-praktik terbaik dan standar-standar untuk keberlanjutan di sektor-sektor spesifik, seperti *Forest Stewardship Council (FSC)*, *International Principles for Responsible Shrimp Farming*, *Roundtable on Sustainable Palm Oil*, *WCD Guidelines on Dams*, *Framework for Responsible Mining*, *Fair Wear Foundation* dan *Fairtrade Standards for Coffee*.

Standar-standar tersebut mungkin saja tidak mengikat, namun standar-standar tersebut mencerminkan konsensus di antara para pemangku kepentingan di dalam sektor-sektor ini mengenai masalah-masalah yang harus diselesaikan dan inisiatif-inisiatif yang perlu diambil. Maka dari itu, standar-standar tersebut memberikan pedoman otoritatif bagi para pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk bagi bank, untuk mencapai keberlanjutan di dalam sektor-sektor tersebut.

Buatlah kebijakan-kebijakan berdasarkan isu

Untuk isu-isu yang penting yang muncul di berbagai sektor yang Anda tangani, bank Anda perlu mendefinisikan kebijakan-kebijakan spesifik mengenai apa yang ingin dicapai oleh bank. Kebijakan-kebijakan isu lintas-sektor tersebut harus meliputi isu-isu seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, penghindaran pajak, korupsi dan tata kelola, namun juga *Millennium Development Goals* yang di antaranya terkait pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan kematian anak.

Kebijakan-kebijakan ini harus menetapkan tujuan-tujuan berdasarkan konvensi-konvensi internasional, seperti *Rio Declaration on Environment and Development*, *Agenda 21* dan *Global Compact*, *ILO Core Labour Standards*, konvensi-konvensi PBB mengenai Hak Asasi Manusia, termasuk *UN Human Rights Norms for Business*, dan konvensi-konvensi lingkungan termasuk *UN Framework Convention on Climate Change* dan *Convention on Biological Diversity*. Kebijakan-kebijakan berdasarkan isu ini juga berdasarkan inisiatif-inisiatif berbagai pemangku kepentingan, seperti *Extractive Industries Transparency Initiative* atau kampanye *Control Arms*.

Dalam berbagai kebijakan isunya, bank harus berhubungan dengan standar-standar internasional dan mendefinisikan kontribusi yang ingin dilakukan untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Beberapa contoh:

1. Perubahan iklim memberikan berbagai ancaman dan risiko keuangan baru bagi para penanam modal, namun juga membuka peluang-peluang baru. Bank-bank harus memainkan peran utama dalam mengubah investasi untuk menghasilkan energi terbarukan dan solusi-solusi efisiensi energi, dan menjauhi investasi beremisi karbon yang tinggi, termasuk bahan bakar fosil. Bank Anda dapat memasukkan risiko perubahan iklim ke dalam identifikasi risiko klien secara keseluruhan, dengan proses dan alat penilaian untuk menentukan pilihan-pilihan penurunan karbon. Komitmen bank Anda untuk mengurangi gas rumah kaca harus dapat diukur, dengan membuat target-target pengurangan emisi di setiap portofolio, dan juga mengarusutamakan tujuan-tujuan pengurangan emisi (seperti penurunan intensitas karbon dari setiap rupiah yang dipinjamkan). Dalam melakukan hal ini, Anda dapat menjadikan beragam dokumen dari *Carbon*

Jangan mengabaikan isu-isu terkait perubahan iklim dalam keputusan-keputusan keuangan. **Pahamilah** pentingnya segera bertindak, jika kita ingin mencegah dampak-dampak perubahan iklim yang sangat buruk di dekade-dekade mendatang.

Disclosure Project sebagai dasar. Proyek ini diinisiasi koalisi investor kelembagaan yang meminta perusahaan-perusahaan terbesar di dunia untuk melaporkan investasi dan informasi emisi gas rumah kaca dari investasi tersebut.

2. Kebijakan hak asasi manusia bank dapat didasarkan kepada *UN Human Rights Norms for Business*. Norma-norma ini terdiri dari pemberlakuan kewajiban-kewajiban hak asasi manusia secara otoritatif dan komprehensif di dalam menjalankan usaha; serta menjelaskan kewajiban perusahaan untuk meningkatkan, melindungi, dan memastikan pemenuhan hak asasi manusia di dalam lingkup aktivitas dan pengaruh bisnisnya masing-masing. Setiap entitas bisnis, termasuk bank, harus mengadopsi, dan secara terbuka menyebarkan dan mengimplementasikan peraturan-peraturan internal operasi mereka sesuai dengan norma-norma PBB tersebut; melakukan investigasi independen atas keluhan-keluhan yang mereka terima; dan mengaplikasikan dan memasukkan norma-norma PBB tersebut ke dalam rantai pasok mereka, serta dalam hubungan-hubungan

bisnis mereka lainnya, seperti kontrak, transaksi, atau pengaturan lainnya. BankTrack memiliki berbagai makalah posisi mengenai bank dan hak asasi manusia.

Membangun kapasitas, melatih, memotivasi dan memberikan penghargaan bagi para karyawan

Untuk mempraktikkan ambisi-ambisi yang tertuang di dalam kebijakan-kebijakan tertentu, bank perlu memberikan perhatian dan sumberdayanya untuk meningkatkan kapasitas, melatih, memotivasi, dan memberikan penghargaan bagi para karyawan. Para karyawan yang terlibat perlu dilatih mengenai isu-isu sosial dan lingkungan yang terkait dengan sektor-sektor, isu-isu, dan negara-negara di mana bank tersebut aktif. Perhatian khusus harus diberikan untuk menginternalisasi misi dan tujuan spesifik bank kepada para karyawan. Selain itu, kebijakan sumberdaya manusia yang berkelanjutan akan menarik, menstimulasi, dan memberikan penghargaan bagi orang-orang yang mampu berkontribusi terhadap misi dan tujuan-tujuan keberlanjutan bank dengan cara yang paling efektif.

Jangan berikan bonus kepada para karyawan Anda (termasuk para anggota Dewan) hanya berdasarkan kuantitas bisnis yang didapatkan, atau marjin dan laba jangka pendek. **Berilah** penghargaan bagi para karyawan yang secara serius mengimplementasikan kebijakan-kebijakan bank Anda. Sistem bonus Anda harus mengintegrasikan keberlanjutan dan cakrawala jangka panjang serta memberikan nilai positif terhadap pengambilan keputusan yang hati-hati.

Doronglah Inovasi

Keberlanjutan global bukanlah tujuan yang mudah dicapai. Perubahan-perubahan radikal diperlukan untuk menggunakan sumberdaya alam kita secara efisien, adil, dan hati-hati untuk memenuhi kebutuhan populasi dunia yang berkembang, dengan menjaga ekosistem yang ada dan mencegah perubahan iklim. Pada saat yang sama, kesejahteraan dan peluang-peluang global perlu didistribusikan kembali untuk memberikan kesempatan yang setara, menjaga hak asasi manusia dan kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat dunia.

Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, kita perlu banyak inovasi. Inovasi teknis mungkin dapat menghasilkan produk-produk baru dan teknik-teknik pemrosesan baru, namun inovasi keuangan juga diperlukan. Bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya perlu untuk menggunakan semua keterampilan intelektual dan keuangannya untuk membantu perusahaan-perusahaan lain mengembangkan inovasi teknis mereka dan membawa mereka ke dalam pasar, untuk membantu masyarakat miskin menciptakan sumber pendapatan untuk hidupnya, dan untuk membuat bisnis-bisnis yang mengelola sumberdaya dan ekosistem dengan cara yang berkelanjutan.

Bank Anda perlu membuat struktur yang dapat mendorong inovasi produk dan proses supaya dapat mencapai tujuan-tujuan keberlanjutan yang telah Anda

definisikan. Struktur-struktur ini perlu dibuat untuk sektor-sektor atau isu-isu spesifik, berkolaborasi dengan klien-klien yang berkomitmen, kelompok industri, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah untuk membuat solusi-solusi keuangan untuk isu, kelompok, dan aktivitas yang tidak cukup diperhatikan pada saat ini. Beberapa contoh:

1. Mengubah pendanaan dari kepada proyek-proyek energi berbasis karbon ke energi terbarukan, seperti energi matahari, energi angin, PLTA skala kecil dan produksi biomassa yang berkelanjutan. Struktur-struktur inovatif yang saat ini digunakan oleh bank-bank untuk membatasi negara dan risiko-risiko spesifik lain dalam pembiayaan pipa minyak dan pembangkit listrik tenaga batu bara harus diberlakukan untuk membuat produksi energi terbarukan dapat dilakukan. Inovasi produk juga diperlukan untuk menghargai penghematan energi dan efisiensi yang dilakukan oleh klien, misalnya dengan menyediakan kredit kepemilikan khusus bagi rumah-rumah yang memanfaatkan energi secara.
2. Bank dapat secara aktif terlibat dalam mendorong praktik-praktik pertanian, kehutanan, dan perikanan berkelanjutan, contohnya dengan berpartisipasi secara aktif di dalam inisiatif-inisiatif multi-pemangku kepentingan yang menetapkan standar keberlanjutan. Walaupun

inisiatif-inisiatif ini telah menghasilkan pembuatan standar-standar keberlanjutan untuk banyak sektor komoditas dan peningkatan keinginan di antara para pemain di pasar untuk membeli komoditas-komoditas yang berkelanjutan, produsen kecil dan menengah sering kekurangan cara-cara pembiayaan yang memungkinkan investasi jangka panjang dalam praktik-praktik yang berkelanjutan. Bentuk-bentuk pembiayaan inovatif dapat membantu menghasilkan keuntungan keanekaragaman hayati dan lingkungan di sana, juga sebagai cara hidup masyarakat pedesaan.

3. Di negara-negara di mana bank memilih untuk aktif, bank harus membuat program-program yang aktif untuk menawarkan pendanaan bagi masyarakat miskin. Para pengrajin skala kecil, pemasok, perusahaan-perusahaan jasa dan inisiatif-inisiatif masyarakat dapat memainkan peran yang besar dalam memperluas kesetaraan sosial dan keadilan ekonomi, saat mereka memiliki akses terhadap pinjaman, akun pembayaran dan jasa-jasa bank lainnya. Saluran pemasaran yang tepat—selain lembaga-lembaga kredit mikro yang ada saat ini—harus

dibangun agar dapat menawarkan pembiayaan-pembiayaan tersebut. Hingga sekarang, banyak orang masih belum bisa mendapatkan jasa – di India saja, 500 juta orang tidak memiliki akses terhadap jasa-jasa bank. Untuk menjangkau peluang-peluang pasar yang besar ini, bank Anda perlu untuk menyesuaikan produk-produk spesifik dengan harga yang lebih rendah untuk melayani populasi ini.

4. Berkolaborasi dengan lembaga-lembaga keuangan, pemain pasar, LSM-LSM, pemerintah untuk menemukan solusi terhadap isu-isu spesifik, seperti mengenai 1,2 miliar orang yang tidak memiliki akses terhadap air yang aman diminum dan 2,6 miliar orang yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi, menurut UNDP. Sebagai akibatnya, 1,8 juta anak meninggal per tahunnya karena diare dan 443 juta hari sekolah hilang karena penyakit-penyakit terkait air. Air dan sanitasi adalah milik publik, harus tetap berada di wilayah publik. Namun, pertanyaannya tetap adalah bagaimana memobilisasi dukungan untuk dan bagaimana membiayai pemenuhan kebutuhan dasar tersebut bagi semua orang di dunia ini.

Jangan menominasikan diri Anda sendiri dengan bersemangat untuk Penghargaan Bank Berkelanjutan atau *Sustainable Banking Award* hanya karena Anda sudah mulai mengepak untuk menempuh perjalanan panjang dan sulit menuju keberlanjutan. **Buatlah** klaim saat Anda sudah berada di tujuan.

3. Komitmen untuk Tidak Merusak

Lembaga-lembaga keuangan harus berkomitmen untuk tidak melakukan perusakan dengan mencegah dan meminimalkan dampak-dampak buruk terhadap lingkungan dan keadaan sosial dari portofolio dan operasi mereka. Lembaga-lembaga keuangan harus membuat kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan standar-standar berdasarkan Prinsip Pencegahan (Precautionary Principle) untuk meminimalkan bahaya sosial, meningkatkan kondisi sosial dan lingkungan di mana mereka dan klien mereka bekerja, dan menghindari keterlibatan dalam transaksi-transaksi yang mengesampingkan keberlanjutan.

Deklarasi Collevocchio

Redefinisi risiko

Komitmen untuk tidak merusak pertama-tama memerlukan definisi kembali mengenai konsep risiko, memperluasnya ke pemangku kepentingan lain di dunia ini. Apakah risiko dari penggunaan pinjaman oleh klien Anda untuk membuka hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi, dan untuk menggusur masyarakat setempat dari tanah mereka, hanya menjadi risiko saat hal tersebut menyebabkan masalah hukum atau merusak reputasi bank Anda? Mungkin dapat disimpulkan bahwa apabila pemerintah mengizinkan investasi itu dan LSM tidak bereaksi maka tidak ada risiko sebenarnya di dalamnya. Tetapi masih dapatkah kita menyebut hal ini tanggung jawab sosial perusahaan?

Sebuah konsep risiko yang sempit dan berpusat pada diri sendiri mungkin berguna dalam fase-fase awal peningkatan kesadaran di antara para pemangku kepentingan dan pegawai-pegawai Anda. Namun, jika bank Anda ingin terus melaju di jalan menuju keberlanjutan, Anda memerlukan konsep risiko yang lebih luas. Definisi risiko yang baru perlu dibuat dalam misi bank untuk mendorong keberlanjutan sosial dan lingkungan. Semua dampak langsung dan tidak langsung dari aktivitas-aktivitas bank yang tidak sesuai dengan misi luasnya, yang merusak lingkungan atau berdampak pada manusia, harus dipertimbangkan sebagai risiko, harus dihindari dan diminimalisasi.

Jangan memperlakukan keberlanjutan hanya sebagai masalah reputasi, walaupun reputasi Anda memang terancam saat Anda mendanai klien yang terlibat dalam perusakan lingkungan atau pelanggaran sosial. **Ketahui** bahwa dalam jangka panjang, risiko-risiko akan jauh lebih dalam jika Anda tidak mengubah arah bank Anda secara drastis.

Standar-standar minimum

Sistem manajemen risiko bank Anda perlu berdasarkan *precautionary principle*, mencegah dan meminimalkan risiko sosial dan lingkungan sejauh mungkin. Untuk dapat melakukannya, bank Anda memerlukan standar-standar minimum untuk berbagai perangkat sektor, isu, dan kebijakan-kebijakan spesifik. Kebijakan-kebijakan ini perlu mendefinisikan standar-standar minimum yang harus dipenuhi sebelum menyediakan jasa keuangan apapun, dan juga mendefinisikan tujuan-tujuan yang lebih ambisius mengenai bagaimana bank mendorong keberlanjutan di dalam sektor-sektor tersebut.

Equator Principles adalah seperangkat kebijakan sektor yang paling terkenal dan sering dihadirkan sebagai jawaban sektor perbankan terhadap tantangan keberlanjutan. Prinsip-prinsip tersebut pertama kali diluncurkan pada bulan Juni 2003 dan direvisi pada bulan Juni 2006. Sebanyak 42 bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya saat ini telah mengadopsi *Equator Principles*, yang disandingkan dengan Standar Kinerja Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial dari International Finance Corporation (IFC).

Banyak LSM menyambut *Equator Principles* saat prinsip-prinsip tersebut pertama kali dikeluarkan, walaupun masih banyak kekurangannya. BankTrack dan lainnya telah memantau *Equator Principles* semenjak pembuatannya dan menawarkan saran-saran konstruktif untuk mengatasi beberapa permasalahan dasar. Sayangnya, sebagian besar dari masalah-masalah ini belum diselesaikan dengan tepat di dalam revisi terbaru *Equator Principles*.

Standar Kinerja yang dikeluarkan IFC (dan karenanya juga *Equator Principles*) dipandang belum cukup mencerminkan hukum maupun praktik terbaik internasional. Pandangan ini tepat khususnya untuk isu-isu seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan perlindungan hutan. Juga, khususnya untuk industri ekstraktif, sektor militer, bendungan, perikanan dan sektor-sektor pertanian. Bank-bank yang mengadopsi *Equator Principles* pun belum cukup memiliki persyaratan dan prosedur implementasi yang konsisten dan kuat untuk menegakkannya. Bank-bank tersebut biasanya tidak menyaratkan transparansi dan juga tidak memiliki mekanisme apapun

Jangan danai proyek-proyek yang meragukan, hanya karena pengajunya memiliki reputasi yang baik, karena tidak ada undang-undang yang dilanggar, atau karena bank pembangunan multilateral juga terlibat di dalamnya. **Sadarilah** bahwa proyek-proyek tersebut melibatkan uang Anda, standar Anda, reputasi Anda dan keputusan Anda – tidak ada yang dapat disembunyikan.

untuk memantau implementasi atau untuk memastikan kepatuhan. Sejauh ini, adopsi *Equator Principles* juga belum mencegah pihak-pihak yang bertandatangan untuk melakukan penawaran atau pembiayaan proyek-proyek yang berisiko tinggi dalam lingkungan dan sosial, yang sedang mencari dukungan dari berbagai pasar keuangan proyek internasional dalam beberapa tahun terakhir.

Karena situasi ini, masih ada kebutuhan yang mendesak agar kebijakan-kebijakan bank melebihi *Equator Principles*, dan membuat kebijakan-kebijakan yang konsisten dengan standar-standar dan praktik-praktik terbaik internasional yang dilakukan secara transparan dan efektif. Bank-bank perlu untuk membuat kebijakan-kebijakan mereka sendiri mengenai isu-isu atau sektor-sektor di mana standar-standar keberlanjutan internasional masih kurang memadai. Salah satu contohnya adalah pembiayaan produksi senjata dan perdagangan senjata. Embargo senjata dan pengendalian ekspor senjata dilanggar terus-menerus, mendukung banyak konflik dan rezim yang represif. Industri pertahanan dikenal dengan standar-standar keberlanjutannya yang rendah, korupsi, dan kurangnya transparansi. Bank manapun yang menyediakan jasa pembiayaan untuk sektor pertahanan mengambil risiko

yang serius untuk terlibat di dalam transaksi-transaksi yang meragukan. Maka, bank perlu membuat sebuah kebijakan sendiri yang komprehensif, mungkin memasukkan daftar hitam perusahaan-perusahaan yang tidak akan dibiayai.

Definisikan lingkup kebijakan-kebijakan

Penting sekali untuk mendefinisikan lingkup dari setiap sektor, kawasan/negara dan kebijakan isu yang telah dibuat oleh bank—menjelaskan dengan spesifik, dalam kondisi-kondisi apa sajakah kebijakan tersebut dapat dilaksanakan. Bagaimanapun juga, sebuah kebijakan dengan kata-kata yang kuat tidak akan mencapai banyak hal jika hanya berlaku dalam sebagian kecil portofolio bank. Lingkupnya harus cukup luas untuk memasukkan semua perusahaan yang terlibat di dalam sebuah sektor atau isu, namun cukup spesifik untuk memastikan implementasi yang efektif. Isu ruang lingkup ini memiliki empat dimensi:

1. *Geografi*: Kebijakan-kebijakan kawasan dan negara tentu saja memiliki lingkup geografis yang terbatas, namun standar-standar minimum harus diberlakukan pada semua klien bank yang aktif di dalam sektor atau terlibat di dalam isu

Jangan melihat *Equator Principles* sebagai praktik terbaik di sektor perbankan. **Bergabunglah** dengan bank-bank yang telah mengadopsi kebijakan dalam sektor-sektor dan isu-isu tertentu yang menetapkan aspirasi yang lebih tinggi dan standar yang lebih ketat dari *Equator Principles*.

tersebut. Namun, dalam hal tujuan-tujuan atau ambisi-ambisi, kebijakan-kebijakan mungkin perlu menetapkan fokus geografis.

2. *Sektor*: Sektor dan sub-sektor apapun dengan profil isu lingkungan dan sosial yang berbeda memerlukan sebuah kebijakan terpisah. Untuk meningkatkan relevansi dan keefektifannya. Contohnya, walaupun satu kebijakan sektor dapat melingkupi sektor pertambangan secara menyeluruh, sebuah kebijakan sektor tunggal untuk sektor pertanian tidak mungkin melingkupi seluruh sektor pertanian. Kebijakan-kebijakan yang terpisah diperlukan untuk kapas, gula, kopi, coklat, kelapa sawit, kedelai, dan komoditas-komoditas pertanian lainnya.
3. *Jenis klien*: Kebijakan-kebijakan sektor seharusnya tidak membatasi ruang lingkup mereka dan jenis standar minimum kepada produsen-produsen utama di dalam sektor (perusahaan-perusahaan pertambangan, produsen energi, dll.) Para pemain hilir di dalam rantai pasok (pedagang, pemroses antara, manufaktur produk-produk konsumen, penjual eceran) juga harus dimasukkan di dalam sebuah kebijakan yang baik, karena mereka

mempengaruhi rantai pasok dengan kuat melalui pembelian yang mereka lakukan. Standar-standar minimum untuk para pemain hilir ini mungkin berbeda dibandingkan dengan yang untuk para produsen utama, fokus lebih banyak terhadap kebijakan pengadaan mereka, meminta kebijakan yang jelas dan transparan, verifikasi independen dan manajemen rantai keterlacakan (*chain of custody*).

4. *Jasa keuangan*: Perbankan yang berkelanjutan pada akhirnya harus memperhatikan dampak-dampak lingkungan dan sosial dari seluruh jasa yang disediakan oleh bank Anda. Hal ini mencakup perbankan retail (akun tabungan, kredit, hipotek), perbankan komersial (pinjaman perusahaan, pembiayaan perdagangan), perbankan investasi (pengeluaran dan perdagangan saham, pembiayaan proyek, analisis saham, merger dan akuisisi, dan jasa advisori untuk perusahaan lainnya), manajemen aset, perbankan pribadi, perbankan pengelolaan harta dan bentuk-bentuk jasa keuangan lainnya. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan lingkungan dan sosial perlu disesuaikan dengan berbagai produk-produk dan jasa-jasa keuangan yang berbeda-beda.

Jangan adopsi kebijakan-kebijakan negara, sektor, atau isu tertentu yang tidak bermanfaat bagi bisnis Anda hanya karena bank-bank lain melakukannya. **Patuhilah** praktik-praktik terbaik internasional dalam standar-standar yang Anda tetapkan sendiri.

Sistem Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial

Untuk memastikan bahwa standar-standar minimum dari kebijakan-kebijakan Anda dapat diaplikasikan untuk semua jasa keuangan, Anda memerlukan sebuah Sistem Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial. Sistem itu harus memasukkan elemen-elemen di bawah ini:

1. Melakukan tinjauan awal untuk mengidentifikasi berbagai risiko dan peluang keberlanjutan bank, dan untuk memb. kebijakan yang tepat;
2. Membuat pendekatan menyeluruh yang kuat yang melibatkan enam prinsip Colavecchio;
3. Membangun kebijakan-kebijakan sektor, kawasan/negara dan isu yang kuat yang berdasarkan norma-norma dan praktik-praktik terbaik internasional, yang termasuk standar-standar yang jelas untuk menyetujui atau menolak transaksi;
4. Membuat struktur organisasi dan akuntabilitas di dalam bank untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan. Secara jelas menugaskan salah satu direktur bank untuk bertanggung jawab atas setiap
5. kebijakan. Buatlah garis internal pelaporan dan akuntabilitas yang memastikan pembuatan keputusan yang efektif dan efisien berdasarkan kebijakan-kebijakan bank. Pastikan bahwa jasa keuangan tidak dapat diberikan jika mereka tidak dinilai berdasarkan kebijakan-kebijakan yang relevan;
5. Memastikan sumberdaya internal yang cukup tersedia untuk mendukung dan melatih para pegawai Anda, dengan membuat sebuah bagian yang khusus di tingkat perusahaan untuk melatih dan mendampingi para staf operasi dalam isu-isu keberlanjutan, termasuk dalam menjalankan kebijakan-kebijakan;
6. Membuat prosedur-prosedur standar untuk transaksi-transaksi yang meliputi prosedur uji tuntas, konsultasi, dan kepatuhan;
7. Menciptakan perangkat yang tidak ambigu (seperti kuesioner atau buku pegangan) untuk prosedur-prosedur uji tuntas. Perangkat-perangkat ini harus mengevaluasi dampak-dampak lingkungan dan sosial dari jasa-jasa keuangan yang diajukan, catatan masa lalu klien, komitmen terhadap

Jangan bersembunyi di balik tugas-tugas fidusia Anda sebagai manajer aset. **Ketahui** bahwa perkembangan-perkembangan hukum baru menunjukkan bahwa tugas-tugas fidusia Anda tidak memaksa Anda untuk mencampakkan isu lingkungan dan sosial.

keberlanjutan, dan kemampuannya dalam mengelola dampak yang diperkirakan;

8. Memastikan proses peninjauan yang independen, komprehensif, dan substantif dari semua dokumen teknis yang disediakan oleh klien, begitu pula dengan kecukupan konsultasi publik.
9. Membuat prosedur-prosedur dan perangkat-perangkat yang memungkinkan pertukaran informasi dan pengetahuan yang canggih mengenai (calon) klien dengan LSM-LSM, bank-bank lain, pemerintah-pemerintah, dan lembaga rating keberlanjutan. Pertukaran informasi ini membantu menstrukturkan dan meningkatkan prosedur uji tuntas Anda;
10. Mengintegrasikan perjanjian-perjanjian yang jelas dengan standar-standar minimum Anda di dalam kontrak-kontrak pinjaman, kontrak-kontrak penjaminan, dan jasa-jasa keuangan lainnya. Perjanjian-perjanjian ini memberikan dasar hukum bagi bank untuk melakukan tindakan hukum yang dibutuhkan, saat klien-klien tidak mematuhi kebijakan-kebijakan bank

selama periode pembiayaan;

11. Memperkenalkan mekanisme formal pemantauan atas klien yang diaplikasikan dalam syarat pembiayaan pinjaman dan jasa-jasa keuangan jangka panjang lainnya, termasuk syarat-syarat pelaporan klien, audit oleh pihak ketiga independen dan tindakan-tindakan korektif yang mungkin dilakukan;
12. Membuat mekanisme penyelesaian keluhan untuk para pemangku kepentingan
13. Melaporkan kepada pihak luar terkait isi dari kebijakan-kebijakan Anda keberlakuan Sistem Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial
14. Memastikan bahwa implementasi Sistem Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial ditinjau secara teratur oleh manajemen bank dan juga oleh auditor internal dan eksternal, yang menghasilkan perbaikan terus-menerus dalam prosedur, perangkat, efisiensi, dan keefektifan.

Jangan berusaha untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial tanpa dukungan apapun. **Berinvestasilah** dengan cukup dalam kapasitas Anda untuk menapis semua klien Anda dalam hal perilaku sosial dan lingkungan mereka, karena dalam jangka panjang hal ini akan membawa manfaat bagi Anda melalui risiko yang lebih rendah dan berbagai peluang bisnis baru.

Implementasi, implementasi, implementasi...

Bukti eksistensi terbaik adalah pelaksanaannya: mengadopsi kebijakan-kebijakan yang kuat dan komprehensif tidaklah cukup – mengimplementasikan sebuah Sistem Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial sangatlah penting. Kebijakan-kebijakan dari bank Anda tidak berarti signifikan jika komitmen-komitmen yang dibuat tidak diimplementasikan. Pengalaman menunjukkan bahwa implementasi kebijakan-kebijakan sering kali adalah titik terlemah, sehingga semua perhatian yang diperlukan harus dicurahkan pada aspek ini.

Jangan menulis kebijakan-kebijakan yang sempurna, menaruhnya dengan bangga di *website* Anda, berbicara mengenai kebijakan-kebijakan tersebut di setiap wawancara, merujuknya saat Anda didekati LSM-LSM – namun Anda gagal mengimplementasikannya. **Pastikan** bahwa semua pegawai memahami dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Anda dan berinvestasi pada fasilitas-fasilitas untuk mendukung kebijakan tersebut.

4. Komitmen terhadap Tanggung Jawab

Lembaga-lembaga keuangan harus bertanggung jawab penuh terhadap dampak-dampak lingkungan dan sosial dalam transaksi-transaksi mereka. Lembaga-lembaga keuangan juga harus turut menanggung beban dari risiko yang mereka terima dan buat. Hal ini termasuk risiko-risiko keuangan, dan juga biaya sosial dan lingkungan yang ditanggung oleh masyarakat.

Deklarasi Collevocchio

Bertanggungjawablah atas dampak-dampak yang tidak langsung Anda sebabkan

Seperti halnya pemain (perusahaan) lainnya, bank Anda memiliki tanggung jawab terhadap dampak-dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas-aktivitas bisnis Anda. Seperti halnya bank-bank terbiasa untuk mengakui bahwa mereka berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara dan sektor-sektor tertentu, mereka juga harus menerima tanggung jawab bersama (dengan klien-klien) atas dampak buruk yang disebabkan oleh keputusan-keputusan keuangan. Menerima tanggung jawab ini seharusnya membuat bank-bank belajar dari kesalahan, menyesuaikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur dan upaya-upaya yang cukup untuk memitigasi dan mengkompensasi dampak-dampak buruk yang mungkin timbul dari keterlibatan Anda dalam berbagai aktivitas.

Menerima tanggung jawab seperti itu dengan penuh adalah jalan penting

menuju keberlanjutan. Ini adalah pelengkap logis dari pendefinisian kembali misi bank Anda untuk memasukkan tujuan-tujuan keberlanjutan yang lebih luas. Saat bank Anda mengumumkan ke masyarakat bahwa bank bertanggung jawab atas dampak lingkungan dan sosial dari jasa-jasa keuangan yang bank sediakan, hal tersebut akan menstimulasi dengan kuat internalisasi misi bank yang lebih luas oleh para pegawai dan pemangku kepentingannya.

Buatlah pedoman pertanggungjawaban

Sesungguhnya bank jarang bertanggung jawab penuh atas dampak-dampak buruk yang disebabkan oleh proyek-proyek mereka dan perusahaan-perusahaan yang mereka biayai: para pemilik, otoritas, dan para pembiaya lainnya juga harus berbagi tanggung jawab. Didasari pengakuan bahwa bank Anda turut bertanggung jawab atas dampak-dampak sosial dan lingkungan terkait jasa-jasa keuangan Anda, Anda perlu berkonsultasi dengan bank-bank lain, LSM-LSM, dan para pemangku kepentingan

lain untuk membuat pedoman-pedoman pertanggungjawaban.

Pedoman-pedoman pertanggungjawaban ini penting untuk menilai tingkat tanggung jawab spesifik dari setiap pemangku kepentingan. Berdasarkan penilaian ini, harus diputuskan, langkah mana sajakah yang harus diambil setiap pemangku kepentingan, termasuk bank Anda, untuk memitigasi dan mengkompensasi dampak-dampak negatif. Pedoman-pedoman tanggung jawab ini dapat dibuat di tingkat nasional, atau dalam tataran sektor secara global. Bank Anda harus mengambil inisiatif untuk memasukkan diskusi ini di dalam agenda inisiatif berbagai pemangku kepentingan yang ada saat ini dan yang baru nanti.

Dukunglah legislasi tanggung gugat lingkungan dan sosial

Untuk melengkapi pembuatan pedoman-pedoman tanggung jawab di dalam berbagai inisiatif multi-pemangku kepentingan, bank Anda harus mendukung upaya-upaya pemerintah untuk mengatur tanggung gugat lingkungan dan sosial bank dalam bentuk. Pemerintah—setidaknya dalam teorinya—mewakili kepentingan masyarakat dan lingkungan. Secara rutin, mereka dihadapkan

dengan perusahaan-perusahaan yang menyebabkan kerusakan berat terhadap lingkungan atau terhadap manusia di dalamnya, yang menyebabkan kerugian lingkungan, sosial dan keuangan yang besar, yang mana tidak ada yang dapat menanggungnya, karena perusahaan yang melakukannya tidak ada lagi, atau tidak memiliki dana yang cukup, atau perusahaan itu berada di luar negeri.

Pemerintah memiliki tugas resmi untuk meningkatkan legislasi tanggung gugat sosial dan lingkungan di tataran nasional dan internasional, untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan asing dan para pemegang kepentingan dapat diminta pertanggungjawabannya atas bencana lingkungan dan social yang disebabkannya. Karena bank sesungguhnya bertanggung jawab (bersama dengan klien-klien mereka dan para pemangku kepentingan lainnya) atas dampak-dampak buruk dari keputusan-keputusan pembiayannya, peran mereka harus dituliskan di dalam regulasi. Upaya-upaya bank Anda harus diarahkan pada dukungan atas pengaturan isu ini dalam cara yang adil dan seimbang di dalam regulasi negara-negara di mana bank Anda aktif di dalamnya. Memastikan kesetaraan dengan cara ini adalah

Jangan berpikir bahwa tidak apa-apa untuk membiayai perusahaan-perusahaan yang melanggar standar-standar minimum lingkungan dan sosial Anda, hanya karena Anda meminta mereka tidak menggunakan uang Anda untuk aktivitas-aktivitas yang melanggar. **Hanya** biayai klien-klien yang memenuhi standar-standar Anda.

kepentingan bank-bank yang memiliki komitmen dan bertanggung jawab.

Selain itu, upaya-upaya juga harus ditingkatkan untuk mengatasi isu tanggung gugat ini di hukum internasional. Di dalam dunia yang makin mengglobal, ini adalah cara yang terbaik untuk mendorong persaingan yang adil bagi semua perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan.

Memastikan praktik-praktik pembiayaan yang adil dan inklusif

Ambillah semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa produk-produk retail bank secara merata tersedia untuk semua klien retail, tanpa melihat ras, etnisitas, gender, atau karakteristik-karakteristik masyarakat lainnya, untuk tingkat bunga yang sama. Pastikan bahwa reinvestasi juga dilakukan pada masyarakat yang kurang beruntung. Ambillah langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah keterlibatan atau mencegah peminjaman uang oleh lintah darat bagi konsumen-konsumen retail. Demikian juga, tinjaulah pola-pola pemberian pinjaman dari pemberi pinjaman retail manapun, khususnya para pemberi pinjaman *subprime*, yang mana

bank mungkin membelinya, atau yang pinjamannya dijamin pengamanannya dengan bank menjalankan fungsi sebagai sebagai perwalian (*trustee*).

Dukunglah solusi-solusi untuk krisis hutang negara berkembang

Sebuah kategori khusus dari klien bank adalah pemerintah-pemerintah dan lembaga-lembaga yang dikendalikan oleh negara di dalam negara yang kaya akan sumberdaya namun masih belum memadai tata kelolanya. Pemerintah-pemerintah di negara-negara tersebut sering mencari pinjaman menggunakan ekspor sumberdaya alam di masa depan, seperti minyak, sebagai jaminan. Keinginan dari lembaga-lembaga keuangan asing untuk meminjamkan dana pada negara-negara tersebut sesungguhnya mengabaikan tekanan internasional untuk melakukan reformasi di negara-negara tersebut terlebih dulu. Pemerintah-pemerintah ini terus mencari pinjaman-pinjaman komersial yang mahal yang didukung oleh sumberdaya alam daripada mencari pinjaman yang lebih lunak dari bank-bank pembangunan, yang mensyaratkan komitmen akan transparansi yang lebih baik. Dengan begitu, lembaga-lembaga keuangan asing

Jangan berkonsentrasi pada perbankan di dalam negara di mana Anda aktif saja, dengan menawarkan jasa-jasa hanya pada sejumlah kecil klien yang kaya. **Jadilah** perbankan yang inklusif dengan menyediakan jasa-jasa keuangan untuk sejumlah besar klien kelas menengah dan miskin. Walaupun sulit, pendekatan ini menawarkan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang.

sesungguhnya membuka jalan untuk lebih banyak penipuan, korupsi, dan kesalahan manajemen dana masyarakat, dan menghambat pembangunan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat dan lingkungannya.

Bank Anda perlu mempertahankan standar tata kelola yang tinggi dan harus menuntut transparansi mengenai penggunaan dana. Masalah-masalah anti korupsi dan tata kelola yang baik yang lebih luas harus dipertimbangkan dalam memberikan pembiayaan bagi para pemerintah. Bank Anda juga harus mendukung peningkatan transparansi dalam hal pinjaman yang dijamin oleh sumberdaya, seperti yang didorong oleh *Extractive Industries Transparency Initiative* dan kampanye *Publish What You Pay*.

Pinjaman-pinjaman masa lalu (yang tidak bersyarat) oleh bank-bank asing kepada pemerintah-pemerintah seperti itu telah menyebabkan krisis hutang saat ini di banyak negara berkembang (disebut sebagai hutang najis atau *odious debt*). Bahkan saat negara-negara tersebut saat ini diperintah oleh pemerintah-pemerintah yang lebih demokratis dan transparan, kemampuan mereka untuk menanamkan modal di dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dilemahkan dengan warisan

hutang dari para pendahulu mereka. Menyadari adanya bagian tanggung jawab Anda di dalam pinjaman-pinjaman masa lalu ini, Bank Anda harus berusaha menemukan solusi-solusi inovatif terhadap krisis hutang negara berkembang dan mendukung permintaan penghapusan hutang yang datang dari lembaga-lembaga masyarakat sipil.

Terimalah tanggung jawab di dalam lingkup pengaruh Anda

Lingkup pengaruh bank anda lebih besar dari portofolio klien-klien Anda. Dalam bekerja dengan lembaga-lembaga rekanan Anda dalam sindikasi pemberian pinjaman, penjaminan emisi, dan konsorsium lainnya, bank Anda dapat memberikan contoh yang baik dan mendorong penggunaan standar-standar dan uji tuntas lingkungan dan sosial. Saat bank Anda melakukan kerja sama strategis dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, bank Anda harus memastikan bahwa komitmen keberlanjutan Anda diterjemahkan ke dalam hubungan-hubungan tersebut. Akhirnya, bank Anda juga memiliki suara di ranah publik dan bisa mendukung penelitian, inisiatif, dan kebijakan-kebijakan yang mendukung keberlanjutan.

Jangan hanya mengeluh mengenai rendahnya standar-standar lingkungan dan sosial di bank-bank lain, contohnya di Tiongkok atau India, yang menyebabkan persaingan yang tidak adil. **Gunakan** koneksi kelembagaan yang Anda miliki untuk mendukung mereka untuk mengadopsi standar keberlanjutan kelas dunia.

5. Komitmen terhadap Akuntabilitas

Lembaga-lembaga keuangan harus bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingannya, khususnya yang terkena dampak perusahaan dan aktivitas yang mereka biyai. Akuntabilitas berarti bahwa para pemangku kepentingan harus memiliki suara yang memadai di dalam keputusan-keputusan keuangan yang mempengaruhi kualitas lingkungan dan kehidupan mereka—untuk memastikan bahwa hak-hak pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, dan juga oleh praktik-praktik dan prosedur-prosedur yang diadopsi oleh lembaga-lembaga keuangan itu sendiri.

Deklarasi Collevocchio

Konsultasikan kebijakan-kebijakan Anda

Bank Anda harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang mata pencaharian dan lingkungannya terkena dampak perusahaan-perusahaan dan aktivitas-aktivitasnya yang Anda biyai, dan juga LSM-LSM yang secara sah membela kepentingan-kepentingan sosial dan lingkungan yang lebih luas. Dalam praktiknya, akuntabilitas ini juga mengharuskan Anda berkonsultasi dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam membuat kebijakan-kebijakan, tujuan-tujuan, prosedur-prosedur, dan standar-standar keberlanjutan. Agar konsultasi ini efektif, penting untuk menerjemahkan kebijakan-kebijakan dalam bahasa yang dipahami oleh pemangku kepentingan setempat. Anda harus mendengarkan dan memperhitungkan kekhawatiran, keberatan, dan masukan-masukan lain yang diajukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil.

Pastikan bahwa informasi cukup terbuka

Sebagai bagian dari prosedur manajemen risiko sosial dan lingkungan bank Anda, bank harus memastikan bahwa klien-klien membuka informasi yang dibutuhkan mengenai dampak-dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas-aktivitas yang diusulkan kepada orang-orang yang terkena dampak dan LSM-LSM, dalam bahasa dan cara yang tepat untuk masyarakat ini. Hal ini juga memenuhi kepentingan bank untuk memastikan bahwa kekhawatiran masyarakat dikemukakan dan diselesaikan sebelum menjadi konflik.

Keterbukaan informasi tidak boleh dihindari oleh klien Anda melalui klaim kerahasiaan bisnis, yang pada umumnya tidak relevan. Sebagian besar informasi lingkungan dan sosial yang relevan bagi orang-orang yang terkena dampak dan LSM-LSM tidaklah berada dalam batasan-

batasan sempit kerahasiaan bisnis. Lebih jauh lagi, kepentingan seorang klien terhadap kerahasiaan tidak boleh menjadi segalanya, kecuali jika kerahasiaan lebih penting daripada hak masyarakat untuk mengetahui dampak-dampak yang mungkin secara langsung mempengaruhi mereka.

Pastikan adanya persetujuan sebelumnya yang bebas dan berdasarkan informasi

Bank harus memastikan bahwa klien-klien mereka secara aktif menghormati hak-hak dari masyarakat adat atas persetujuan sebelumnya yang bebas dan berdasarkan informasi atau *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)*. Hak ini sudah diakui di dalam hukum internasional. FPIC adalah negosiasi interaktif dua arah yang memberikan masyarakat pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Proses ini memerlukan informasi terbuka sepenuhnya, dan seawal mungkin, mengenai potensi dampak dari investasi yang diusulkan. FPIC harus dilakukan dalam investasi apapun yang memiliki risiko atau ancaman pada masyarakat yang bersangkutan. Mensyaratkan peminjam untuk memenuhi FPIC dalam projek-projek tertentu seperti bendungan, pertambangan, infrastruktur besar, dan sebagainya, sesungguhnya menguntungkan bank Anda karena masyarakat yang terlibat akan mendukung projek tersebut sebelum Anda perlu memutuskan pembiayaannya.

Buatlah mekanisme penyelesaian keluhan

Bank Anda perlu membuat mekanisme penyelesaian keluhan untuk para pemangku kepentingan setempat dan lainnya sebagai bagian dari Sistem Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial, seperti yang digambarkan di dalam bab 3 dalam Komitmen untuk Tidak Merusak. Mekanisme keluhan ini harus terbuka bagi orang-orang yang mata pencaharian dan lingkungannya terkena dampak perusahaan dan aktivitas yang dibiayai oleh bank, juga untuk LSM yang secara sah membela kepentingan lingkungan dan sosial secara lebih luas. Mekanisme penanganan keluhan harus setidaknya meliputi elemen-elemen di bawah ini:

1. Menjelaskan secara spesifik siapa yang bertanggung jawab untuk setiap kebijakan di dalam bank;
2. Menjelaskan secara spesifik siapa yang harus menanggapi keluhan-keluhan mengenai kemungkinan tidak patuhnya klien terhadap satu atau lebih kebijakan bank;
3. Menjelaskan secara khusus berapa lama tanggapan dapat diharapkan untuk dapat diberikan ke orang atau pihak yang menyampaikan keluhan;
4. Membuat prosedur penyidikan dan pembuatan keputusan yang harus dijalankan;

5. Memastikan bahwa seluruh kekhawatiran masyarakat yang terkena dampak mengenai aktivitas klien didengarkan secara langsung dan tidak disaring oleh klien;
6. Menjelaskan secara khusus, langkah-langkah apa saja yang akan diambil oleh bank setelah sebuah keluhan telah dinilai dan dinyatakan sebagai keluhan yang sah. Langkah-langkah ini harus memasukkan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di dalam Sistem Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial itu sendiri, dan/atau penilaian-penilaian korektif terhadap pegawai-pegawai yang tidak melaksanakan prosedur;
7. Menjelaskan secara spesifik apa saja tindakan yang akan diambil oleh bank untuk memitigasi dan mengkompensasi dampak-dampak yang timbul.

Mekanisme penyelesaian keluhan internal ini dapat dibuat dan diatur oleh bank Anda secara individual, selain mekanisme-mekanisme lain yang dibuat bersama dengan bank-bank lain yang berkomitmen, seperti para pihak yang menandatangani *Equatorial Principles*.

Dukunglah peraturan sektor keuangan mengenai isu-isu sosial dan lingkungan

Selain mekanisme penyelesaian keluhan internal, bank Anda juga harus mendukung upaya-upaya pemerintah untuk mengatur sektor keuangan dalam isu-isu sosial dan lingkungan. Mengikuti adopsi *Basel Capital Accord II* (BCA II) pada bulan Juni 2004, para pembuat peraturan keuangan di seluruh dunia menuntut bank-bank untuk membuat sebuah "penilaian risiko yang komprehensif". BCA II tidak menentukan risiko mana saja yang harus dinilai; hal ini diserahkan pada para pembuat regulasi di masing-masing negara.

Pemerintah dan para pembuat regulasi dapat, dan maka karenanya, harus mengambil inisiatif untuk mewajibkan penilaian komprehensif atas risiko sosial dan lingkungan bagi semua bank yang melaksanakan aktivitas di dalam yurisdiksi mereka. Hal ini artinya adalah kombinasi kebijakan-kebijakan sektor, negara, dan isu dengan standar-standar minimum yang tegas, implementasi Sistem Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial yang efektif dan prosedur-prosedur akuntabilitas dan transparansi yang jelas. Para pembuat regulasi dapat merangsang dan

Jangan sekadar berharap LSM-LSM, orang-orang yang terkena dampak dan yang lainnya dapat mempercayai pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh bagian humas Anda. **Bangunlah** reputasi yang berkelanjutan melalui transparansi dan akuntabilitas di dalam praktik-praktik Anda berbisnis.

melengkapi hal ini dengan membuat sebuah mekanisme penanganan keluhan di tingkat nasional, yang terbuka bagi orang-orang yang mata pencaharian dan lingkungannya terkena dampak aktivitas-aktivitas yang dibiayai oleh bank-bank dari negaranya, dan juga bagi LSM-LSM yang secara sah membela kepentingan-kepentingan lingkungan dan sosial yang lebih luas.

Bank Anda perlu meresapi bahwa penilaian risiko lingkungan dan sosial yang komprehensif adalah wajib di semua yurisdiksi di mana bank Anda melakukan operasinya, dilengkapi dengan mekanisme penanganan keluhan. Inisiatif-inisiatif untuk membuat tingkat persaingan yang adil melalui peraturan sektor keuangan, seperti inisiatif WWF yang berkaitan dengan sektor kelapa sawit di Indonesia, harus didukung.

6. Komitmen atas Transparansi

Lembaga-lembaga keuangan harus transparan kepada para pemangku kepentingan, bukan hanya melalui keterbukaan yang kuat, teratur, dan terstandarisasi, namun juga dengan bersikap responsif kepada kebutuhan-kebutuhan para pemangku kepentingan atas informasi khusus mengenai kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan transaksi-transaksi lembaga keuangan. Kerahasiaan bisnis tidak boleh digunakan sebagai dalih untuk tidak memberikan informasi pada para pemangku kepentingan.

Deklarasi Collevocchio

Laporan keberlanjutan tahunan

Dalam dunia yang berubah dari perilaku “percaya-lah kepada saya” menjadi “tunjukkan kepada saya”, transparansi sangatlah penting. Bank Anda harus melaporkan setiap tahunnya mengenai langkah-langkah yang diambil untuk memenuhi misi yang dibuat. Isu-isu lingkungan dan sosial manakah yang menjadi prioritas teratas bank Anda dan apa yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan isu-isu tersebut? Pedoman dari The Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah titik rujukan yang membantu bagi pembuatan laporan tersebut.

Transparansi kebijakan-kebijakan dan implementasi

Transparansi bank Anda kepada para pemangku kepentingannya mensyaratkan keterbukaan dari semua kebijakan yang berlaku untuk negara, isu, dan sektor yang telah Anda adopsi—tidak ada manfaatnya membuat kebijakan namun merahasiakannya—termasuk definisi dan lingkup kebijakan-kebijakan tersebut. Sebagai tambahan, bank harus responsif terhadap permintaan pemangku kepentingan atas informasi spesifik mengenai kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur bank Anda.

Jangan pikir bahwa hanya dengan bergantung pada pedoman GRI, atau hanya dengan menjawab pertanyaan dengan cara yang minim, akan bisa memenuhi pelaporan bank yang memadai. **Sadarilah** bahwa pedoman GRI termasuk suplemen sektor keuangannya menggunakan bahasa yang luas dan dirancang untuk sektor keuangan secara keseluruhan. Tingkatkanlah transparansi Anda untuk melampaui titik patokan tersebut.

Sebagai bagian dari laporan keberlanjutan Anda, bank Anda juga harus melaporkan secara sistematis implementasi dari Sistem Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial Anda. Hanya dengan ini para pemangku kepentingan dapat memeriksa peningkatan kemampuan bank dalam membuat perubahan bagi manusia dan Bumi. Jika bank Anda sebenarnya mengimplementasikan Sistem Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial yang efisien dan efektif, bank Anda juga seharusnya menjadi pemimpin dalam transparansi atasnya. Hal ini dapat memberikan Anda perangkat yang ideal untuk membuktikan bahwa misi dan kebijakan Anda lebih dari sekedar retorika belaka, dan memisahkan bank Anda secara tegas dari mereka yang hanya memiliki dokumen sebagai pajangan saja.

Isu-isu yang harus dimasukkan dalam melaporkan implementasi dari Sistem Manajemen Risiko Sosial dan Lingkungan Anda, termasuk:

1. Penjelasan dari aktivitas-aktivitas bisnis utama Anda berdasarkan sektor dan negara/kawasan;
2. Isi dari kebijakan-kebijakan isu, sektor, dan negara/kawasan Anda;
3. Deskripsi dari Sistem Manajemen Risiko

Lingkungan dan Sosial, termasuk deskripsi mengenai tingkat manajemen yang bertanggung jawab atas kepatuhan, dan garis pelaporan dan akuntabilitas internal;

4. Perangkat informasi dan prosedur yang digunakan dalam proses uji tuntas, termasuk peninjauan independen dokumen-dokumen dan konsultasi pemangku kepentingan oleh klien;
5. Penjelasan dari upaya-upaya pelatihan dan pengembangan kapasitas staf;
6. Informasi mengenai persetujuan-persetujuan dalam kontrak yang dibuat dan mekanisme pemantauan atas klien;
7. Contoh-contoh spesifik dari ketidakpatuhan material terhadap kebijakan, standar, dan persetujuan kontrak bank, termasuk sifat-sifat ketidakpatuhan, tindakan yang diambil untuk memperbaikinya, apakah tindakan itu sudah menghasilkan perbaikan, dan, jika tidak berhasil, apa saja tindakan lebih jauh yang telah diambil (termasuk membatalkan pinjaman);
8. Deskripsi mekanisme keluhan bagi para pemangku kepentingan; dan

Jangan menerbitkan laporan keberlanjutan tahunan Anda untuk tujuan-tujuan pemasaran belaka. **Terbitkanlah** laporan berdasarkan parameter-parameter yang terstandarisasi dan yang dapat diverifikasi, yang diaudit oleh pihak eksternal.

9. Ringkasan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dari tinjauan eksternal terhadap Sistem Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial, dan juga langkah-langkah yang diambil oleh manajemen bank untuk meningkatkan prosedur, perangkat, efisiensi, dan keefektifan.

Pemaparan eksternal ini dapat dilakukan oleh bank Anda secara individu namun juga dapat dilakukan bersama sekelompok bank yang berkomitmen, seperti para penandatanganan *Equator Principles*.

Bukalah detail dari klien-klien penting

Bukti yang paling meyakinkan bagi para pemangku kepentingan Anda bahwa Sistem Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial Anda bekerja dengan baik adalah pada keterbukaan tentang portofolio dari klien-klien yang menerima jasa keuangan dari bank Anda. Para pemangku kepentingan harus dapat menemukan nama dan detail dari klien-klien besar bank—klien-klien perusahaan, pemerintah, proyek—di dalam *website* Anda. Sebaiknya, laporan-laporan penilaian lingkungan dan sosial juga disediakan. Kerahasiaan bisnis tidak boleh digunakan sebagai dalih untuk tidak memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan.

Patokan di dalam bidang ini sudah ditetapkan sejak lama oleh bank-bank pembangunan multilateral, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan lain-lain. Dalam beberapa tahun belakangan ini, banyak Lembaga Kredit Ekspor atau *Export Credit Agencies* (ECA) mulai menayangkan di *website* mereka setidaknya detail-detail inti dari klien-klien yang mereka biyai. Pada awalnya, ECA memiliki keberatan yang sama dengan yang masih dimiliki oleh kebanyakan bank-bank privat, yaitu bahwa kerahasiaan klien tidak dapat dilanggar. Namun, pada saat ini, sebagian besar ECA mengumumkan di depan kepada para klien mereka bahwa nama mereka akan dipublikasikan, dan ini membuka jalan menuju transparansi yang lebih tinggi.

Bank Anda dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk memenuhi transparansi para pemangku kepentingannya. Sebagai langkah pertama, bank Anda dapat menaruh dalam *website*, detail dari para peserta pinjaman dan sindikasi penjamin emisi. Semenjak kesepakatan-kesepakatan ini ditayangkan di dalam media massa di sektor keuangan, tidak ada argumen yang cukup kuat yang melawan langkah tersebut.

Jangan melarang LSM-LSM dan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi mengenai kesepakatan tertentu dengan dalih kerahasiaan bisnis, namun pada saat bersamaan berkoar-koar tentang keterlibatan Anda di dalam sindikat tersebut di iklan yang besar di media massa. **Bukalah** nama-nama dan detail penting dari para klien besar Anda.

7. Komitmen atas Pasar dan Tata Kelola Berkelanjutan

Lembaga-lembaga keuangan harus memastikan bahwa pasar mampu mendorong keberlanjutan dengan secara aktif mendukung kebijakan publik, mekanisme pasar dan/atau peraturan yang memfasilitasi keberlanjutan, dan yang mendorong penghitungan biaya atas seluruh eksternalitas lingkungan dan sosial.

Deklarasi Collevocchio

Dukunglah transparansi di dalam industri ekstraktif

Negara-negara yang dipimpin dengan baik yang dikaruniai cadangan minyak, gas, dan mineral dapat menghasilkan pendapatan yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan. Namun, saat pemerintah lemah, mereka dapat menyebabkan kemiskinan, korupsi, dan konflik—yang disebut sebagai kutukan sumberdaya alam. Penting untuk memastikan bahwa para warga negara dan masyarakat tuan rumah mendapatkan keuntungan dari investasi industri ekstraktif.

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dan koalisi Publish What You Pay (PWYP) bertujuan untuk melawan kutukan sumberdaya alam ini dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mengenai pendapatan

yang dihasilkan dan diberikan kepada pemerintah. EITI adalah inisiatif multi-pemangku kepentingan, dengan mitra-mitra dari pemerintah, perusahaan minyak, gas, dan pertambangan, LSM, dan manajer aset yang meminta pemerintah untuk mempublikasikan apa yang mereka dapatkan dari pemanfaatan sumberdaya alam. Koalisi PWYP memiliki fokus yang serupa dan juga mengadvokasi perusahaan-perusahaan ekstraktif untuk mempublikasikan apa yang mereka bayarkan kepada pemerintah. Koalisi ini juga mengadvokasikan pemaparan ketetapan penting di dalam kontrak antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan ekstraktif (seperti bagian yang relevan secara lingkungan dan sosial dalam *Host Government Agreements* atau *Intergovernmental Agreements*). Bank Anda perlu mendukung EITI dan inisiatif PWYP dan bekerja dengan kriteria mereka.

Jangan bingung membedakan keberlanjutan dengan legalitas dan jangan bersembunyi di balik undang-undang di negara-negara yang korup dan tidak demokratis. **Apakah** Anda mempercayai pemerintah-pemerintah ini untuk melindungi reputasi Anda?

Dukunglah peraturan sektor keuangan mengenai isu-isu lingkungan dan sosial

Pertimbangan-pertimbangan lingkungan dan sosial pada umumnya jarang ditemukan di dalam peraturan dan perundangan sektor keuangan. Untuk mendukung kemampuan pemerintah untuk meningkatkan keberlanjutan dan untuk membuat persaingan yang adil dengan tingkat keberlanjutan yang tinggi, bank Anda harus mendukung upaya-upaya untuk memasukkan isu-isu lingkungan dan sosial di dalam peraturan-peraturan sektor keuangan di negara-negara di mana bank Anda aktif. Sebagai contoh, regulasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perbankan, atau peraturan-peraturan yang membuat penilaian yang komprehensif mengenai risiko lingkungan dan sosial wajib bagi semua bank, dilengkapi dengan mekanisme-mekanisme penanganan keluhan yang berlaku secara nasional.

Di tingkat internasional, bank Anda harus berkontribusi terhadap apa yang

dikerjakan oleh UNEP Finance Initiative dalam menstimulasi lembaga-lembaga keuangan, contohnya yang ada di pasar-pasar yang sedang tumbuh, untuk berperilaku dengan cara yang lebih bertanggung-jawab.

Hindari suka pajak

Bank harus menghindari dan mencegah penggunaan suka pajak. Suka-suka pajak membantu orang super-kaya dan bisnis untuk menghindari pajak, yang mengurangi bermiliar dolar pajak yang harusnya menjadi pendapatan pemerintah setiap tahunnya, dan yang membatasi potensi pemerintah untuk mendistribusikan kembali kekayaan, dan membatasi peluang penguatan pembangunan. Bagian perbankan yang mengurus penitipan harta dan perbankan pribadi tidak boleh terlibat di dalam aktivitas suka pajak maupun dalam transaksi-transaksi keuangan yang memfasilitasi pemindahan modal secara ilegal.

Jangan melobi untuk tidak memasukkan bank ke dalam pembuatan regulasi terkait tanggung jawab lingkungan—seperti yang terjadi di Amerika Serikat berkaitan dengan pembuatan undang-undangan CERCLA, dan di Eropa yang berkaitan dengan *Environmental Liability Directive*. **Gunakan** pengaruh politik yang Anda miliki untuk meningkatkan regulasi yang mendorong pembangunan berkelanjutan.

Masukkan isu-isu lingkungan dan sosial ke dalam riset saham

Para analis saham di dalam bank Anda harus berjuang untuk memasukkan kinerja keberlanjutan perusahaan ke dalam riset mereka, dan membuat berbagai rekomendasi berdasarkan cakrawala waktu yang lebih panjang. Bank harus membangun pengetahuan lingkungan dan sosial para analis sahamnya, juga memberikan perhatian yang setara untuk isu-isu lingkungan dan sosial di dalam laporan-laporan analis mereka.

Bank dengan aktivitas-aktivitas manajemen aset harus setidaknya mengadopsi *UN Principles for Responsible Investment* yang diluncurkan pada bulan April 2006, yang menuntut untuk memasukkan isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam proses analisis investasi dan pembuatan keputusan. Bank juga perlu mendukung *Enhanced Analytics Initiative*, di mana para penandatanganannya berkomitmen untuk menambahkan komisi broker dan penyedia riset eksternal setidaknya 5% bagi mereka yang telah menunjukkan kemampuan untuk memasukkan permasalahan di luar keuangan (seperti lingkungan, sosial dan tata kelola) ke dalam analisis keuangan mereka.

Berinvestasilah di dalam inisiatif-inisiatif sektor

Jika bank Anda memilih untuk terlibat di dalam sektor dan kawasan, atau negara, tertentu, bank Anda harus memainkan peran yang aktif dalam mendukung inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan keberlanjutan pasar dan tata kelola di dalam sektor-sektor dan negara-negara ini. Inisiatif-inisiatif sektor, contohnya termasuk *Marine Stewardship Council*, *Kimberley Process*, *Roundtable on Responsible Soy*, *Forest Stewardship Council*, *Silicon Valley Toxics Coalition*, dll.

Perdagangan mata uang dan turunannya

Volume perdagangan mata uang di dunia dan turunannya melebihi USD1.500 miliar per hari, sedangkan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diperkirakan adalah sekitar USD 8.000 miliar per tahun. Ini berarti, lebih banyak uang yang ditukarkan di pasar mata uang dalam satu minggu dibandingkan dengan volume perdagangan tahunan dari ekonomi produktif.

Volume perdagangan yang besar ini pada dasarnya berhubungan dengan

Jangan mendukung perusahaan-perusahaan yang meragukan dan para individu super-kaya dalam menghindari pembayaran pajak di negara-negara di mana mereka berada. **Aku!** pentingnya pembayaran pajak untuk meningkatkan kemampuan pemerintah.

penanaman modal jangka pendek dan spekulatif, yang sering menyebabkan ketidakstabilan pasar (seperti krisis keuangan Asia tahun 1997/98) dan mendorong perusahaan-perusahaan untuk hanya mencari laba jangka pendek dibandingkan tujuan-tujuan keberlanjutan dalam jangka panjang.

Perdagangan mata uang dan turunan-turunannya oleh bank harus dihubungkan secara langsung dengan risiko-risiko dan transaksi-transaksi ekonomi produktif dan tidak boleh mencari keuntungan jangka pendek dan spekulatif. Bank Anda juga harus mencegah klien-klien Anda untuk mengejar operasi yang spekulatif.

Jangan merekomendasikan kepada para investor mengenai saham dan obligasi perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi standar minimum lingkungan, sosial dan tata kelola yang telah ditetapkan bank Anda. **Masukkan** isu-isu lingkungan dan sosial secara memadai di dalam analisis saham dan prospektus saham.

Kesimpulan

Seperti yang mungkin telah Anda simpulkan dari penjelasan di atas, perbankan berkelanjutan itu sulit; perbankan yang berkelanjutan meliputi pembuatan perubahan besar di dalam bisnis Anda. Walaupun mungkin masih dirasakan bahwa ini adalah pilihan yang terbuka bagi bank-bank swasta (atau perusahaan swasta pada umumnya) untuk mengikuti atau mengabaikannya, tren di dalam dunia keuangan dan harapan-harapan di dalam masyarakat tidak salah lagi adalah menuju kewajiban untuk menjawab tantangan keberlanjutan ini. Manual ini mungkin dapat berguna.

Epilog

TuK Indonesia memiliki perhatian kepada nasib masyarakat yang hidupnya bergantung kepada sumberdaya alam di seantero negeri. Apa yang kemudian dipelajari dari kehidupan masyarakat tersebut adalah bahwa hubungan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang mengelola lahan yang luas—termasuk dan terutama perkebunan kelapa sawit—bersifat problematik. Di satu sisi, ada peluang peningkatan kesejahteraan melalui hubungan itu. Di sisi lainnya, terdapat risiko akibat pengelolaan sosial dan lingkungan yang tak memadai dari perusahaan.

Berbagai cara dilakukan oleh TuK Indonesia untuk membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu. Tentu, penelitian diperlukan untuk benar-benar mengetahui kondisi lapangan dan kelindan ekonomi politik dan ekologi politik yang melingkupi permasalahan itu. TuK Indonesia kemudian memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk melakukan berbagai kegiatan advokasi, mengubah perilaku masyarakat, perusahaan dan pemerintah.

Salah satu hal yang paling penting dipelajari dari beberapa tahun bekerja di sini adalah bahwa ada kaitan yang sangat erat antara apa yang dilakukan perusahaan pengelola lahan dengan sumberdaya finansialnya, baik yang diperoleh dari investasi, pinjaman bank, maupun pasar modal. TuK Indonesia menyadari bahwa mengubah sektor keuangan untuk lebih memperhatikan dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola

(*environment, social, and governance*, disingkat ESG) adalah salah satu jalan yang perlu ditempuh untuk mengubah perilaku perusahaan.

Uang atau modal adalah barang netral. Sama dengan peluru yang bisa dipergunakan untuk menjaga keamanan negara dari serangan tentara musuh atau teroris, tetapi bisa dipergunakan untuk kepentingan menghancurkan keamanan; uang juga bisa dipergunakan untuk mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan dan sosial, tetapi bisa juga bisa dipergunakan untuk kegiatan yang—disengaja atau tidak—merusak daya dukung lingkungan dan tatanan sosial. Kabar buruknya, sebagian besar uang masih mengabdikan pada tujuan yang bertentangan dengan keberlanjutan. Kabar baiknya, kondisi itu sangat mungkin diubah.

Oleh karena itu, TuK Indonesia kemudian turut dalam gerakan mentransformasikan sektor keuangan untuk memastikan bahwa sektor ini bekerja untuk mencapai tujuan keberlanjutan sebagaimana yang dicita-citakan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu wujudnya adalah dengan mendorong, mendukung, dan mengawal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menelurkan kebijakan terkait keuangan berkelanjutan.

Di penghujung 2014, Indonesia menempatkan dirinya menjadi salah satu negara yang paling awal memiliki Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan. Di

penghujung Juli 2017, peta jalan itu bahkan ditindaklanjuti menjadi Peraturan OJK (POJK) tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Lagi-lagi, ini membuat Indonesia menjadi pemuka di antara negara-negara lainnya, karena mereka yang telah memiliki regulasi keuangan berkelanjutan sesungguhnya masih bisa dihitung dengan jari. Sama sekali belum banyak negara yang memilikinya. Dan hal ini perlu mendapatkan sambutan yang hangat.

TuK Indonesia kemudian mendapati bahwa regulasi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut oleh lembaga-lembaga jasa keuangan yang hendak mempergunakannya. Maka, sebuah dokumen yang sangat terkenal kemudian masuk ke dalam radar TuK Indonesia. Dokumen tersebut, yang ada di tangan para pembaca sekalian adalah sebuah buklet bertajuk *The Do's and Don'ts of Sustainable Banking* yang diterbitkan BankTrack pada tahun 2006. Penulisnya Jan Willem van Gelder yang merupakan pendiri dan direktur Profundo adalah salah satu pakar paling terkenal dalam keuangan berkelanjutan.

Buklet yang kini diterjemahkan TuK Indonesia ke dalam bahasa Indonesia sudah berumur lebih dari satu dekade, namun seluruh nasihatnya—baik tentang apa yang perlu dilakukan maupun yang sebaiknya dihindari—tetap sangat relevan, terutama untuk bank-bank di Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan POJK itu. Dan TuK

Indonesia sangat beruntung karena bukan saja penulisnya membolehkan dokumen penting ini untuk diterjemahkan, melainkan juga bersedia memberikan prolog untuk edisi ini.

Tentu, sebagai dokumen yang sudah cukup lama, maka berbagai pembaruan perlu untuk dilakukan. Tetapi, sebagaimana yang akan dirasakan oleh para pembaca, semua pesan yang ada di dalamnya bukan saja relevan, namun masih bisa memandu bank-bank—sebagai salah satu penyedia jasa keuangan yang menjadi subjek POJK—dalam menjalani transformasi untuk benar-benar menjadi bank yang berkelanjutan di masa mendatang.

Menjadi bank yang berkelanjutan artinya menjadi bank yang visi dan misinya benar-benar kompatibel dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs), juga perjanjian internasional lain yang terpenting seperti Kesepakatan Paris tentang perubahan iklim. Di satu sisi, bank perlu memastikan bahwa perusahaan dan proyek yang mereka biayai tidak bertentangan dengan SDGs dan Kesepakatan Paris. Di sisi lain, bank bisa memanfaatkan sebuah bentuk ekonomi yang sesuai dengan kecenderungan baru tersebut—disebut *green economy*, *low carbon economy*, *new climate economy* dan sebutan lainnya—untuk keuntungan bisnisnya.

TuK Indonesia dalam interaksinya dengan sejumlah bank di Indonesia mendapati

bahwa banyak di antara mereka yang khawatir bahwa gerakan keberlanjutan membuat pembatasan-pembatasan yang akan menyebabkan bank sulit berinvestasi, sehingga pendapatan dan keuntungannya akan menyusut. Buklet ini berargumentasi bahwa kekhawatiran tersebut sesungguhnya tak beralasan karena perhatian kepada ESG justru akan membuat bank menjadi semakin kokoh manajemen risikonya. Ancaman-ancaman seperti bencana alam dan kerusakan sosial yang bisa membuat perusahaan dan proyek terhenti operasinya bisa diminimumkan.

Dalam buklet ini ditunjukkan bahwa memang ada masalah lantaran belum benar-benar terciptanya persaingan yang adil (*level playing field*), yang oleh banyak bank dikhawatirkan juga membuat mereka kehilangan klien ketika standar ESG yang lebih baik mulai diterapkan pada penapisan investasi. Namun, kondisi tersebut sesungguhnya sudah sangat membaik. Tiongkok yang dalam buklet ini dinyatakan sebagai salah satu negara yang hingga tahun 2006 belum memiliki standar yang baik, kini telah menjadi salah satu pemimpin global dalam bidang ini. Beberapa tahun lalu mereka telah memiliki regulasi *green banking* yang dikeluarkan oleh People's Bank of China.

Hanya beberapa hari sebelum epilog ini ditulis, sebuah artikel berjudul *Corporate Sustainability and Financial Performance of Chinese Banks* karya Olaf Weber—salah satu tokoh terpenting dalam gerakan

keuangan berkelanjutan—terbit di *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, Vol. 8/3, 2017. Artikel itu membuktikan bahwa bukan saja kinerja lingkungan dan sosial bank-bank di Tiongkok yang mengalami peningkatan pada periode 2009-2013, melainkan juga keuntungan yang mereka hasilkan. Weber sendiri menyatakan bahwa peran dari regulasi *green banking* di dalamnya sangat jelas. Dan, hubungan di antara kinerja keberlanjutan dan kinerja keuangan itu ditemukan sebagai kausalitas bidireksional. Artinya, kinerja keberlanjutan yang membaik itu membuat kinerja keuangan naik dan keuntungan yang lebih tinggi membuat bank semakin mampu membiayai peningkatan kinerja keberlanjutannya. Lingkaran kebaikan (*virtuous cycle*) pun tercipta.

Studi-studi yang demikian semakin mudah ditemukan. Kalau pada masa awalnya selalu dinyatakan bahwa hubungan antara kinerja keberlanjutan dan kinerja keuangan tidaklah konsisten, kini semakin banyak ditemukan bukti bahwa korelasinya cenderung positif. Studi Eisenbach, dkk (2014) yang berjudul *Sustainable Project Finance, the Adoption of the Equator Principles and Shareholder Value Effects* yang dimuat jurnal *Business Strategy and the Environment*, Vol. 23/6 jelas menunjukkan bahwa lembaga jasa keuangan yang mengadopsi *Equator Principles* memang mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan rerata lembaga jasa keuangan. Walaupun,

Equator Principles yang sejak 2013 sudah menjadi generasi ketiga tetap saja memiliki sejumlah kekurangan—terutama dalam aspek perlindungan lingkungan dan HAM (Worsdorfer, 2015)—sebagaimana yang dinyatakan juga di dalam buklet ini. *Equator Principles* mungkin adalah salah satu standar keuangan berkelanjutan yang paling populer, namun masih perlu ditingkatkan untuk benar-benar menjadi sesuai dengan ekspektasi atas praktik terbaik.

Ada banyak dokumen baru yang perlu menjadi masukan bagi bank-bank yang hendak secara sungguh-sungguh menapaki jalan keberlanjutannya. Di tahun 2012 ada *The Future We Want* yang menegaskan apa saja yang perlu dilakukan oleh setiap aktor dan sektor. Dokumen tersebut bisa menjadi dasar bagi yang ingin mengetahui ekspektasi pemangku kepentingan global. Terkait dengan sektor keuangan, ada beberapa dokumen *The Financial System We Need* yang mulai diterbitkan pada 2015. Tentu saja, detail tentang SDGs dan Kesepakatan Paris juga penting dipelajari. Generasi ketiga *Equator Principles* sendiri—betapapun belum sempurnanya—bisa dianggap sebagai sumber inspirasi yang menarik untuk menjadi patokan yang perlu dilampau. Standar pelaporan untuk sektor keuangan juga tersedia dari lembaga seperti The Global Reporting Initiative. Selain itu, bank-bank di Indonesia juga bisa melihat apa yang sudah dilakukan oleh bank-bank lain di level internasional yang

dinilai relatif progresif dalam salah satu atau lebih aspek perbankan berkelanjutan.

Akhirnya, buklet ini selain diharapkan menjadi kawan seiring yang handal bagi para bankir dan pemangku kepentingan dalam perjalanan menuju perbankan berkelanjutan, sesungguhnya juga merupakan pendorong untuk berjalan lebih cepat. Indonesia membutuhkan transformasi segera untuk membuat seluruh sektor mengarahkan dirinya ke arah keberlanjutan. TuK Indonesia—melalui penerbitan edisi bahasa Indonesia buklet ini; serta program, proyek, dan aktivitas lainnya—berharap agar bank-bank di Indonesia tergerak untuk menjadikan dirinya sebagai pemimpin dalam transformasi tersebut.

Jakarta, 2 September 2017

Rahmawati Retno Winarni
Direktur Eksekutif, TuK Indonesia

Jala
Penasihat Keuangan Berkelanjutan, TuK Indonesia

I. Deklarasi Collevocchio mengenai Lembaga-Lembaga Keuangan dan Keberlanjutan

Kesimpulan

Seperti yang mungkin telah Anda simpulkan dari penjelasan di atas, perbankan berkelanjutan itu sulit; perbankan yang berkelanjutan meliputi pembuatan perubahan besar di dalam bisnis Anda. Walaupun mungkin masih dirasakan bahwa ini adalah pilihan yang terbuka bagi bank-bank swasta (atau perusahaan swasta pada umumnya) untuk mengikuti atau mengabaikannya, tren di dalam dunia keuangan dan harapan-harapan di dalam masyarakat tidak salah lagi adalah menuju kewajiban untuk menjawab tantangan keberlanjutan ini. Manual ini mungkin dapat berguna.

Lembaga-lembaga keuangan dapat dan harus memainkan peran yang positif dalam meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Deklarasi ini, didorong oleh lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil, meminta lembaga-lembaga keuangan untuk menerima enam komitmen dan mengambil langkah-langkah segera untuk mengimplementasikan komitmen-komitmen tersebut sebagai cara lembaga-lembaga keuangan untuk mempertahankan izin sosial mereka untuk beroperasi. Komitmen-komitmen ini merefleksikan harapan-harapan masyarakat sipil atas peran dan tanggung jawab sektor keuangan dalam meningkatkan keberlanjutan.

Peran dan Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Keuangan

Peran lembaga keuangan dalam memfasilitasi dan mengatur modal adalah penting; dan keuangan, seperti halnya komunikasi atau teknologi, tidak secara langsung bersinggungan dengan keberlanjutan. Namun, di dalam konteks globalisasi saat ini, lembaga-lembaga keuangan memainkan peran-peran penting dalam menyalurkan aliran keuangan, membuat pasar keuangan, dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan internasional dengan cara yang sering kali tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada warga, dan berbahaya bagi lingkungan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

Lembaga-lembaga keuangan telah memainkan peran dengan menyalurkan uang secara tidak bertanggung jawab pada perusahaan-perusahaan yang tidak etis, pemerintah-pemerintah yang korup, dan proyek-proyek yang tidak baik. Di Selatan, lembaga-lembaga keuangan meningkatkan perannya pembiayaan, yang berarti mereka turut bertanggung jawab atas krisis keuangan, dan beban besar hutang negara berkembang. Namun, sebagian besar lembaga keuangan masih tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh transaksi-transaksi mereka, walaupun mereka biasanya mengaku berperan dalam pembangunan ekonomi dan keuntungan yang dihasilkan dari

jasa-jasa mereka. Dan masih sedikit lembaga-lembaga keuangan—dalam peran mereka sebagai kreditur, analis, penanggung, penasehat, atau investor—yang secara efektif menggunakan kekuatan mereka untuk secara baik menyalurkan pembiayaan ke dalam perusahaan-perusahaan yang berkelanjutan, atau mendukung klien-klien mereka untuk merangkul keberlanjutan.

Pada saat bersamaan, sebagian besar lembaga keuangan tidak memainkan peran yang proaktif dalam membuat pasar keuangan yang menghargai masyarakat dan lingkungan. Sebagai perusahaan, lembaga-lembaga keuangan berkonsentrasi untuk memaksimalkan nilai pemilik saham. Sedangkan sebagai pemberi biaya, mereka ingin memaksimalkan laba; peran ganda ini berarti lembaga-lembaga keuangan telah berperan penting dalam membuat pasar keuangan yang umumnya hanya menghargai keuntungan jangka pendek. Cakrawala waktu yang singkat ini mengakibatkan tekanan besar bagi perusahaan untuk mengutamakan laba jangka pendek dibandingkan tujuan-tujuan keberlanjutan dalam jangka yang lebih panjang, seperti stabilitas sosial dan kesehatan ekologi.

Pada akhirnya, walaupun pekerjaan badan-badan kebijakan publik internasional seperti lembaga-lembaga Bretton Woods, peran dari lembaga-lembaga keuangan terus berkembang karena negara-negara melakukan deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi pasar ekonomi dan keuangan mereka. Lembaga-lembaga keuangan tidak hanya aktif mendukung kebijakan dan proses ini, namun mereka juga diuntungkan darinya melalui laba dan pengaruh yang meningkat.

Dalam banyak sekali kasus, lembaga-lembaga keuangan telah secara tidak adil mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan masyarakat dan lingkungan. Contohnya, saat krisis keuangan, banyak lembaga keuangan membebankan premi berisiko tinggi kepada negara-negara yang berhutang, sedangkan pada saat yang bersamaan mendapatkan keuntungan dari dana talangan masyarakat. Beberapa lembaga keuangan telah berbicara dan tidak setuju dengan proses restrukturisasi hutang negara yang diusulkan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil dan sekarang sedang didiskusikan di International Monetary Fund (IMF). Dan suara lembaga-lembaga keuangan tidak ada dalam upaya menangani suka-suka pajak, sebuah masalah yang sangat menghambat kemajuan menuju kesetaraan dan keberlanjutan.

Sebagai akibatnya, masyarakat sipil sering mempertanyakan akuntabilitas dan tanggung jawab sektor keuangan, dan menantang izin sosial untuk beroperasinya lembaga keuangan. Sebagai pemain-pemain besar di ekonomi dunia, lembaga keuangan harus merangkul komitmen terhadap keberlanjutan yang merefleksikan praktik terbaik dari gerakan tanggung jawab sosial perusahaan, pada saat bersamaan menyadari bahwa usaha-usaha sukarela

sendiri tidak cukup, dan mereka harus mendukung peraturan-peraturan yang akan membantu meningkatkan keberlanjutan di setiap sektor.

Enam Komitmen terhadap Prinsip-Prinsip Utama

Menyadari bahwa lembaga-lembaga keuangan, seperti halnya semua perusahaan, ada sebagai ciptaan masyarakat untuk bertindak bagi kepentingan umum, lembaga-lembaga keuangan harus melakukan restorasi dan proteksi atas lingkungan, serta menegakkan hak asasi manusia universal dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini harus inheren di dalam produk dan jasa keuangan yang mereka tawarkan, dan dalam melaksanakan bisnis mereka.

Keuangan dan perdagangan telah menjadi pusat diskoneksi antara sumber, produksi, dan konsumsi sumberdaya alam dunia sepanjang sejarah. Saat kita telah sampai kepada batas-batas ekologis yang membahayakan seluruh ekonomi, sektor keuangan harus ambil bagian untuk memperbaiki ketidaksinambungan yang telah disebabkan olehnya itu. Karenanya, tujuan lembaga-lembaga keuangan yang tepat seharusnya adalah peningkatan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial, bukan hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Untuk mencapai tujuan ini, lembaga-lembaga keuangan harus merangkul enam komitmen di bawah ini:

1. Komitmen untuk Keberlanjutan

Lembaga keuangan harus memperluas misi-misinya, dari yang memprioritaskan laba sebesar-besarnya menjadi visi keberlanjutan sosial dan lingkungan. Komitmen untuk keberlanjutan membuat lembaga-lembaga keuangan harus mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan batasan-batasan ekologi, keadilan sosial, dan keadilan ekonomi ke dalam strategi-strategi perusahaan dan area-area bisnis utama (termasuk kredit, penanaman modal, penjaminan, dan advisori), untuk membuat tujuan-tujuan keberlanjutan menjadi setara dengan maksimalisasi nilai yang diterima oleh para pemegang saham dan kepuasan klien, dan untuk secara aktif mengusahakan transaksi-transaksi keuangan yang mengedepankan keberlanjutan.

2. Komitmen untuk Tidak Merusak

Lembaga-lembaga keuangan harus berkomitmen untuk tidak melakukan perusakan dengan mencegah dan meminimalkan dampak-dampak buruk terhadap lingkungan dan keadaan sosial dari portofolio dan operasi mereka. Lembaga-lembaga keuangan harus membuat kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan standar-standar berdasarkan Prinsip Pencegahan untuk meminimalkan bahaya sosial, meningkatkan kondisi sosial dan

lingkungan di mana mereka dan klien mereka bekerja, dan menghindari keterlibatan dalam transaksi-transaksi yang mengesampingkan keberlanjutan.

3. Komitmen terhadap Tanggung Jawab

Lembaga-lembaga keuangan harus bertanggung jawab penuh terhadap dampak-dampak lingkungan dan sosial dalam transaksi-transaksi mereka. Lembaga-lembaga keuangan juga harus turut menanggung beban dari risiko yang mereka terima dan buat. Hal ini termasuk risiko-risiko keuangan, dan juga biaya sosial dan lingkungan yang ditanggung oleh masyarakat.

4. Komitmen terhadap Akuntabilitas

Lembaga-lembaga keuangan harus bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingannya, khususnya yang terkena dampak perusahaan dan aktivitas yang mereka biayai. Akuntabilitas berarti bahwa para pemangku kepentingan harus memiliki suara yang memadai di dalam keputusan-keputusan keuangan yang mempengaruhi kualitas lingkungan dan kehidupan mereka—untuk memastikan bahwa hak-hak pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, dan juga oleh praktik-praktik dan prosedur-prosedur yang diadopsi oleh lembaga-lembaga keuangan itu sendiri.

5. Komitmen atas Transparansi

Lembaga-lembaga keuangan harus transparan kepada para pemangku kepentingan, bukan hanya melalui keterbukaan yang kuat, teratur, dan terstandarisasi, namun juga dengan bersikap responsif kepada kebutuhan-kebutuhan para pemangku kepentingan atas informasi khusus mengenai kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan transaksi-transaksi lembaga keuangan. Kerahasiaan bisnis tidak boleh digunakan sebagai dalih untuk tidak memberikan informasi pada para pemangku kepentingan.

6. Komitmen atas Pasar dan Tata Kelola Berkelanjutan

Lembaga-lembaga keuangan harus memastikan bahwa pasar mampu mendorong keberlanjutan dengan secara aktif mendukung kebijakan publik, mekanisme pasar dan/ atau peraturan yang memfasilitasi keberlanjutan, dan yang mendorong penghitungan biaya atas seluruh eksternalitas lingkungan dan sosial.

II. Sumber-sumber informasi yang direkomendasikan

Laporan-Laporan

1. *A Big Deal? Corporate Social Responsibility and the Finance Sector in Europe*, Report by nef (new economics foundation) for the COrporate REsponsibility coalition, London, December 2005;
2. *Equator Principles II - NGO comments on the proposed revision of the Equator Principles*, BankTrack, Utrecht, 26 April 2006;
3. *Investing in climate change: the role of Dutch banks*, Report by Dutch Sustainability Research for Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands), Amsterdam, June 2006;
4. *People, Planet, Palm Oil? - A Review of the Oil Palm and Forest Policies adopted by Dutch Banks*, Report by Profundo and AIDEnvironment for Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands), Amsterdam, April 2006;
5. *Shaping the Future of Sustainable Finance - Moving from Paper Promises to Performance*, Report by WWF United Kingdom and BankTrack, London / Utrecht, January 2006;
6. *Solidly Swiss? Credit Suisse, UBS and the global oil, mining and gas industry*, Report by BankTrack and Erklärung von Bern, Utrecht / Zürich, June 2006.

Website BankTrack dan anggota-anggotanya

- BankTrack: www.banktrack.org
- Amigos da Terra - Amazonia Brasileira: www.amazonia.org.br/ef
- Berne Declaration: www.evb.ch
- Campagna per la Riforma della Banca Mondiale: www.crbm.org
- Center for Human Rights and Environment: www.cedha.org.ar/en
- Fair Finance Watch: www.fairfinancewatch.org
- Friends of the Earth United States: www.foe.org
- Friends of the Earth Netherlands - Milieudefensie: www.milieudefensie.nl

- International Rivers Network: www.irn.org
- Les Amis de la Terre - FoE France: www.amisdelaeterre.org
- Mineral Policy Institute: www.mpi.org.au
- Netwerk Vlaanderen: www.netwerkvlaanderen.be
- Platform: www.carbonweb.org
- Rainforest Action Network: www.ran.org
- Urgewald: www.urgewald.de
- WEED: www.weed-online.de
- WWF-UK: www.wwf.org.uk

Website-website relevan lainnya

- Agenda 21: www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21
- Carbon Disclosure Project: www.cdproject.net
- Clean Clothes Campaign: www.cleanclothes.org
- Cluster Munition Coalition: www.stopclustermunitions.org
- Consortium on Shrimp Farming and the Environment: www.enaca.org
- Control Arms: www.controlarms.org
- Convention on Biological Diversity: www.biodiv.org
- Dams and Development Project: www.unep.org/dams
- Enhanced Analytics Initiative: www.enhancedanalytics.com
- *Equator Principles*: www.equator-principles.com
- Extractive Industries Transparency Initiative: www.eitransparency.org

- Fair Wear Foundation: www.fairwear.nl
- Forest Stewardship Council: www.fsc.org
- Framework for Responsible Mining: www.frameworkforresponsiblemining.org
- Global Reporting Initiative: www.globalreporting.org
- International Fair Trade Association: www.ifat.org
- International Labour Organisation: www.ilo.org
- Kimberley Process: www.kimberleyprocess.com
- Marine Stewardship Council: www.msc.org
- OECD Guidelines for Multinational Enterprises: www.oecd.org/daf/investment/guidelines
- Publish What You Pay: www.publishwhatyoupay.org
- Ramsar Convention on Wetlands: www.ramsar.org
- Round Table on Responsible Soy: www.responsiblesoy.org
- Roundtable on Sustainable Palm Oil: www.rspo.org
- Silicon Valley Toxics Coalition: svtc.eto toxics.org
- Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants: www.pops.int
- Sustainable Food Laboratory: www.sustainablefood.org
- UN Framework Convention on Climate Change: www.unfccc.int
- UN Global Compact: www.unglobalcompact.org
- UN Millennium Development Goals: www.un.org/millenniumgoals
- UN Principles for Responsible Investment: www.unpri.org
- UNEP Finance Initiative: www.unepfi.org
- United Nations: www.un.org

Perbankan Berkelanjutan:

Apa yang Perlu Dilakukan dan yang Sebaiknya Dihindari

- United Nations Development Programme: www.undp.org
- Universal Declaration of Human Rights: www.udhr.org
- Voluntary Principles on Security and Human Rights: www.voluntaryprinciples.org



Jl. Tebet Utara IIA No. 13, Tebet, Jakarta Selatan 12810
Telp. 021-8352955; Email: office@tuk.or.id;
Website: www.tuk.or.id